



BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK





BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK



Kata Pengantar

PUJI dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LAKIN Direktorat SIS berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LAKIN Direktorat SIS BPS Tahun 2025 memberikan informasi hasil kinerja melalui pengukuran pencapaian kinerja visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis BPS RI Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat SIS Tahun 2025. Laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat SIS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama tahun 2025.

Isi dari LAKIN ini merupakan kolaborasi dari seluruh tim di Direktorat SIS, untuk itu kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat selalu menyelesaikan tugas dan amanah yang kita emban.

Jakarta, 19 Januari 2026
Direktur Sistem Informasi Statistik,



Joko Parmiyanto, MEDC
NIP. 197909092000121003





Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Ringkasan Eksekutif.....	xi
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	4
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	5
1.4. Potensi dan Permasalahan	6
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	7
Bab 2. Perencanaan Kinerja.....	9
2.1. Visi dan Misi BPS	11
2.2. Target Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik 2025-2029.....	12
2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat SIS Tahun 2025	14
2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	14
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	21
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja.....	23
3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat SIS Tahun 2025	25
3.2. Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra	35
3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	38
3.4. Prestasi dan Inovasi Direktorat Sistem Informasi Statistik	50
3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran	52
Bab 4. Penutup	55
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Rekomendasi Perbaikan Kinerja	58
Lampiran	lx



Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1.	Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat SIS Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	6
Tabel 1.2.	Total Pagu Anggaran Direktorat SIS Menurut Program Tahun 2025.....	6
Tabel 2.1.	Sasaran Kegiatan untuk Tahun 2025 – 2029	13
Tabel 2.2.	Target Rencana Kerja Pembinaan PSS.....	15
Tabel 2.3.	Pagu Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025	21
Tabel 3.1.	Predikat PKO.....	26
Tabel 3.2.	Interpretasi Predikat PKO	26
Tabel 3.3.	Perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025....	28
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja BPS Terhadap Renstra.....	35
Tabel 3.5.	Realisasi dan Capaian Pembinaan pada Kementerian Pertahanan	39
Tabel 3.6.	Realisasi dan Capaian Pembinaan pada BASARNAS.....	39
Tabel 3.7.	Realisasi dan Capaian Pembinaan pada BSSN.....	40
Tabel 3.8.	Realisasi dan Capaian Pembinaan pada BIN	41
Tabel 3.9.	Realisasi dan Capaian Pembinaan pada Bawaslu	41
Tabel 3.10.	Realisasi dan Capaian Pembinaan pada Ombudsman RI.....	42
Tabel 3.11.	Inovasi Direktorat Sistem Informasi Statistik.....	50
Tabel 3.13.	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	52



Daftar Gambar

Halaman

Gambar a.	Tiga Sasaran Pelaksanaan Misi DSIS 2025	xiii
Gambar b.	Daya Serap Anggaran dan Capaian Kinerja DSIS 2025	xiv
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Sistem Informasi Statistik	4
Gambar 1.2	Proporsi SDM Direktorat SIS menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	5
Gambar 2.1	Rencana Target Sasaran DSIS 2025	11
Gambar 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Total Direktorat SIS selama Tahun 2023-2025...	25
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik dengan Rata-Rata Eselon II BPS Pusat.....	27
Gambar 3.3	Rencana Tindak Lanjut Indikator Sasaran Kegiatan 1	29
Gambar 3.4	Rencana Tindak Lanjut Indikator Sasaran Kegiatan 2	31
Gambar 3.5	Rencana Tindak Lanjut Indikator Sasaran Kegiatan 3	33
Gambar 3.6	Perbandingan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2025 dan 2029	35



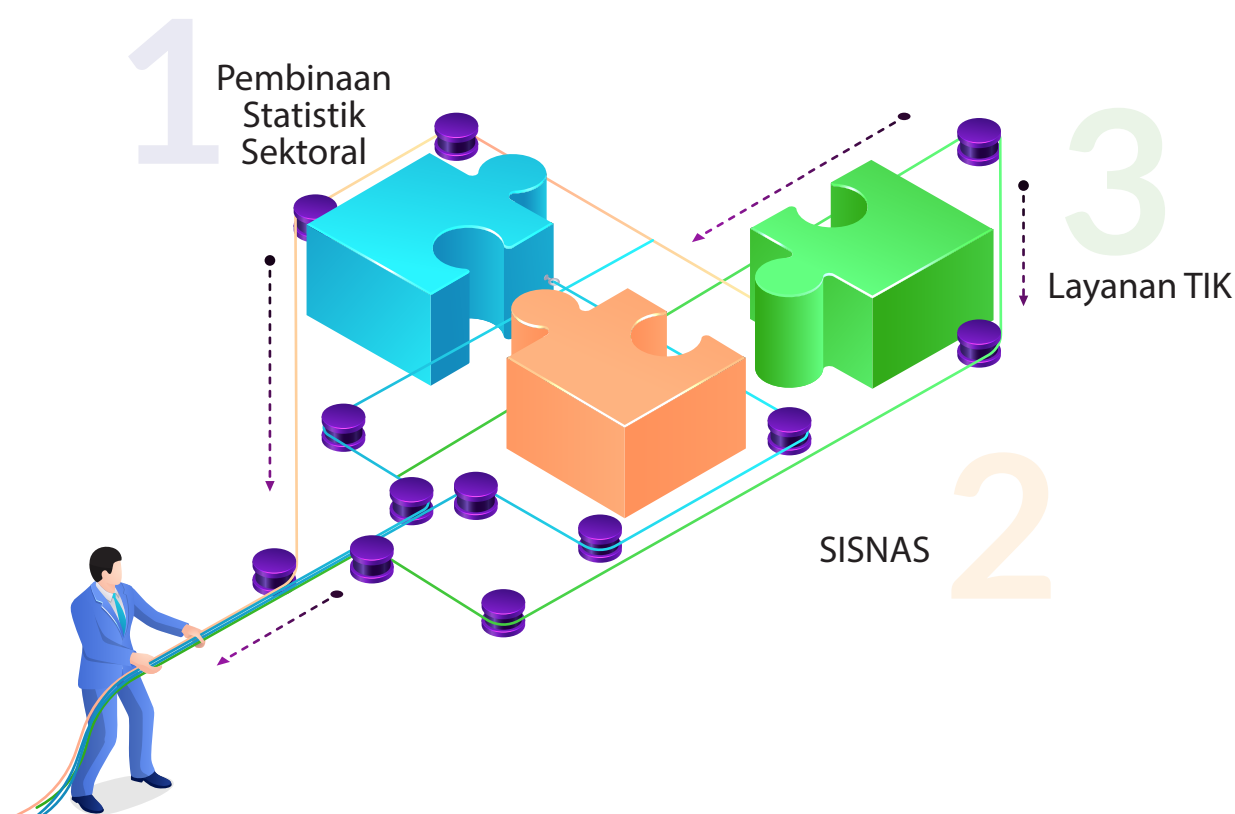


RINGKASAN EKSEKUTIF



Ringkasan Eksekutif

LAPORAN Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Direktorat SIS merupakan unit kerja di bawah Kedeputusan Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan integrasi sistem informasi statistik, integrasi pengolahan data, jaringan komunikasi data, dan pengelolaan teknologi informasi. Direktorat SIS mempunyai 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki indikator kinerja terukur sebagai dasar dalam menilai dan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja unit kerja. Untuk mencapai visi dan misi Direktorat SIS, maka ditetapkan tujuan capaian kinerja yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien. Tujuan ini dicapai dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:



Gambar a. Tiga Sasaran Pelaksanaan Misi DSIS 2025

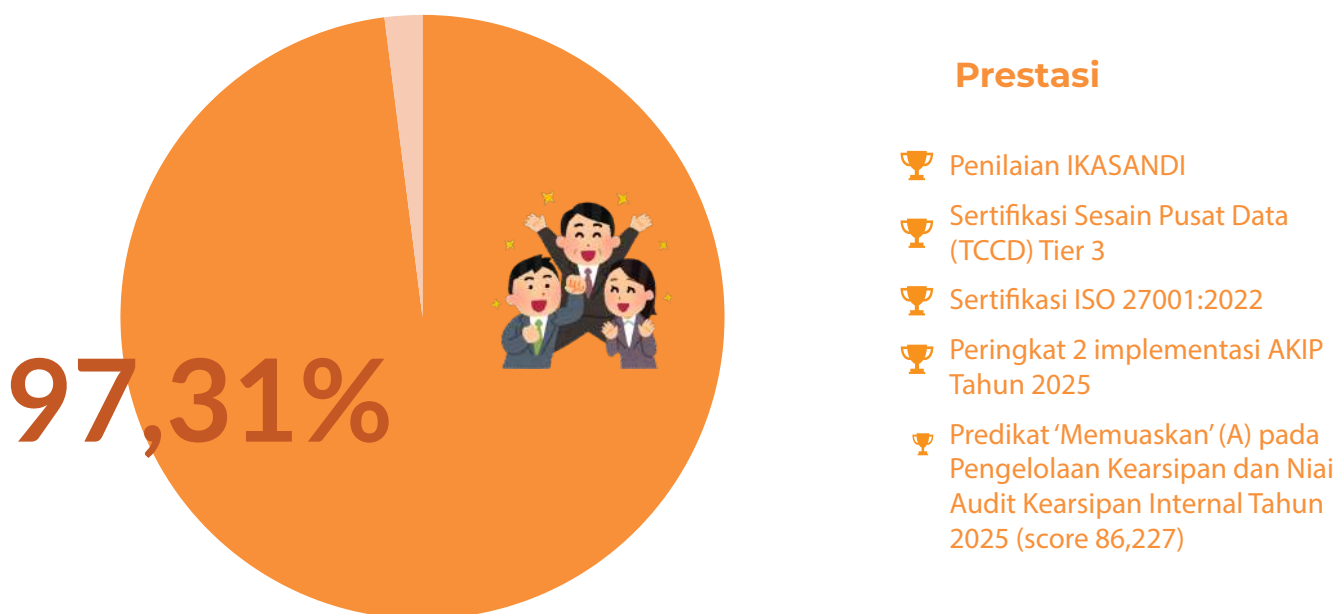
- Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik.
- Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional.
- Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima.

Pada Tahun 2025, Direktorat Sistem Informasi Statistik menetapkan tiga sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama. Secara umum, seluruh sasaran strategis telah tercapai, dengan capaian

kinerja berada pada rentang 100,00% hingga 102,10%, yang menunjukkan kinerja sesuai hingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Sasaran *Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra* mencapai capaian sebesar 102,10%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan statistik sektoral berjalan lebih baik dari yang direncanakan. Sasaran *Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional* tercapai 100,00%, mencerminkan bahwa seluruh target pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) telah direalisasikan sesuai dengan rencana. Sementara itu, sasaran *Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima* mencapai 100,05%, yang mengindikasikan tingkat kepuasan layanan TIK telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, sampai akhir tahun 2025 Direktorat SIS mengelola pagu anggaran sebesar **Rp314.722.233.000** dimana terdapat penambahan pagu sebesar **Rp47.871.433.000** dari pagu yang tertera pada Perjanjian Kinerja Reviu di bulan Oktober 2025. Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp306.270.176.094** atau **97,31 persen**, yang telah mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat SIS secara efektif dan akuntabel.



Gambar b. Daya Serap Anggaran dan Capaian Kinerja DSIS 2025

Capaian kinerja dari indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran telah memenuhi target dengan pemanfaatan anggaran yang optimal. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan berbagai macam kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal. Selain itu, pada tahun 2025 Direktorat SIS juga telah mencapai berbagai macam prestasi diantaranya:

- a. Penilaian IKASANDI untuk Kategori Sistem Elektronik Strategis: FASIH dengan pencapaian:
 1. Target **Nilai Kematangan Siber** secara nasional adalah 2.51. BPS mendapatkan nilai kematangan keamanan siber 3.98, yaitu di Level 4 (dari 5) - Terkelola
 2. Target **Nilai Kematangan Persandian** secara nasional adalah 2.77. BPS mendapatkan nilai kematangan keamanan siber 2.92, yaitu di Level 3 - Terdefinisi.
- b. BPS berhasil mendapatkan sertifikasi *Surveillance* ISO 27001:2022 ke 2 dengan cakupan Fasilitas DC DRC, API Webservices, dan FASIH.
- c. Pusat Data (Data Center) BPS telah mendapatkan sertifikasi desain Pusat Data (TCCD) Tier 3 untuk menunjukkan komitmen BPS terhadap standar kelas Pusat Data Dunia serta menjamin keandalan,

ketersediaan, dan redundansi layanan Pusat Data BPS.

- d. Peringkat 2 implementasi AKIP Tahun 2025 kategori Unit Kerja Badan Pusat Statistik.
- e. Mendapatkan predikat Memuaskan (A) untuk Pengelolaan Kearsipan dan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 86,227.

Meskipun pada pemenuhan masing-masing indikator kinerja terdapat kendala yang dihadapi, namun demikian telah disusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan komitmen Direktorat SIS untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.





PENDAHULUAN



Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi AKIP, salah satunya dengan penyusunan pelaporan kinerja tahunan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, termasuk unit kerja pada instansi pemerintah. Penyusunan LAKIN Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) Tahun 2025, adalah perwujudan kewajiban Direktorat SIS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Direktorat SIS di tahun yang akan datang.

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat SIS dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar;
- d. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS.

- f. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS.
- g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik 2025–2029.
- h. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS; maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat SIS BPS adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Direktorat SIS merupakan unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (DBMIS) BPS RI yang lokasinya berada di Kantor BPS, Jl. Dr Sutomo No. 6–8, Jakarta Pusat.

b. Tugas

Direktorat SIS mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data, pengembangan sistem informasi, layanan teknologi informasi, serta pengolahan data, dan integrasi data.

c. Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data, pengembangan sistem informasi, layanan teknologi informasi, serta pengolahan data, dan integrasi data;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data, pengembangan sistem informasi, layanan teknologi informasi, serta pengolahan data, dan integrasi data;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data, pengembangan sistem informasi, layanan teknologi informasi, serta pengolahan data, dan integrasi data; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Sistem Informasi Statistik.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Sistem Informasi Statistik



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Informasi Statistik

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, Direktorat SIS terdiri dari:

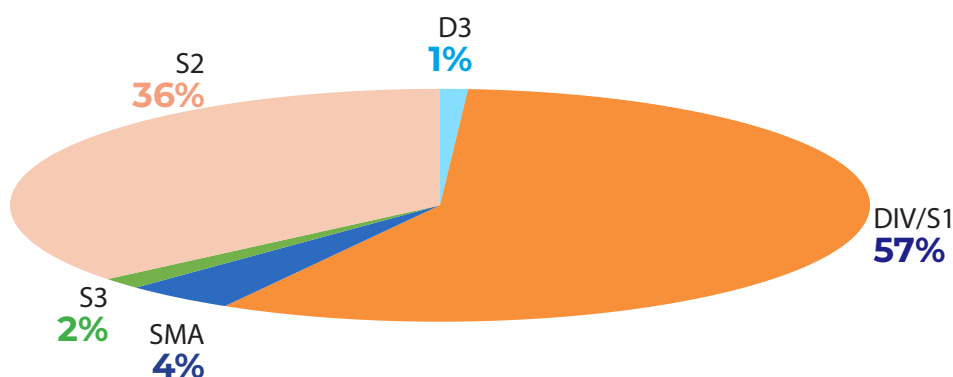
1. Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Data;
2. Subdirektorat Integrasi Data; dan
3. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Jabatan fungsional yang ada di Direktorat SIS sampai saat ini terdiri dari Fungsional Pranata Komputer baik tingkat keahlian (Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama) maupun keterampilan (Terampil, Mahir, dan Penyelia) serta jabatan pelaksana..

Walaupun pada tahun 2025 telah terbit peraturan BPS mengenai struktur organisasi Direktorat SIS yang baru tetapi karena pejabat yang mengisi jabatan struktural belum dilantik, maka fungsi pelaksanaan Direktorat SIS didistribusikan menjadi 11 (sebelas) tim kerja Direktorat SIS, yang terbagi menjadi:

1. Tim Strategi TI
2. Tim BackOffice Selindo (BOS)
3. Tim C O R E
4. Tim Enabler
5. Tim HARMONIS
6. Tim JKD
7. Tim Manajemen Layanan TI
8. Tim Pengolahan
9. Tim Pengujian Aplikasi
10. Tim Platform SDI
11. Tim Supportify

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran



Gambar 1.2 Proporsi SDM Direktorat SIS menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Jumlah pegawai Direktorat SIS tercatat 192 orang pegawai yang terdistribusi ke dalam sebelas tim kerja Direktorat SIS. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang diakui sesuai dengan data SDM. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat Pendidikan D-IV/ S1 sebanyak 110 orang (57%); SDM dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 69 orang (36%); SDM dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 8 orang (4%); SDM dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 3 orang (2%); dan 2 orang pegawai tamatan DIII (1%). Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM Direktorat SIS sangat baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat SIS Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025.

Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	S3	S2	DIV/S1	DIII	SLTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktorat SIS	3	69	110	2	8	192

Di antara pegawai tersebut, sebanyak 6 orang sedang menjalani Tugas Pendidikan S2, dan 3 orang sedang menjalan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Secara komposisi ASN terdapat 192 pegawai PNS dan 1 orang PPPK.

Selain dukungan SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan kinerja, Direktorat SIS tahun 2025 juga didukung dengan penganggaran yang sesuai. Total anggaran yang dialokasikan kepada Direktorat SIS baik dari Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) maupun Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp 316.519.882.000,- namun anggaran tersebut masih terdapat nilai self blocking (efisiensi) sebesar Rp. 1.797.649.000,-. Besaran alokasi anggaran Direktorat SIS pada akhir tahun 2025 secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Total Pagu Anggaran Direktorat SIS Menurut Program Tahun 2025

Program	Pagu (Rp)	Self Blocking (Rp)	Pagu yang Dapat Digunakan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
GG. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	265.832.907.000	1.797.649.000	264.035.258.000
WA. Dukungan Manajemen	50.686.975.000		50.686.975.000

*sumber data: BackOffice Selindo (BOS)

1.4. Potensi dan Permasalahan

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan untuk penyempurnaan. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang terjadi pada tahun anggaran 2025 diantaranya adalah:

- Tata Kelola TI di lingkungan BPS dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aset TIK belum optimal.
- Tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM TI dalam hal *database*, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum TI lainnya masih tidak merata.
- Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI.
- Kegiatan pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan waktu dalam pembahasan dan persetujuan melalui proses *clearance* oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu juga dibutuhkan waktu untuk migrasi ke Pusat Data Nasional (PDN).
- Infrastruktur TI yang mendukung tersedianya layanan TI mencakup *server*, *storage* dan perangkat jaringan di *data center* BPS sebagian besar sudah *end-of-service* dimana masa pemakaian perangkat sudah melebihi 5 tahun. Selain itu sebagian besar perangkat juga telah memasuki masa *end-of-support*. Jika tidak dilakukan peremajaan perangkat, maka dikhawatirkan dukungan terhadap

layanan TI tidak akan berjalan maksimal.

Disamping kendala yang dihadapi, Direktorat SIS memiliki potensi atau peluang yang dapat dioptimalkan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- a. Direktorat SIS memiliki SDM yang cukup banyak sehingga dapat dioptimalkan untuk menangani berbagai inisiatif kegiatan di lingkungan Direktorat SIS.
- b. BPS memiliki infrastruktur TI yang cukup memadai untuk digunakan dalam pengembangan sistem dan aplikasi untuk mendukung visi dan misi BPS.
- c. BPS memiliki perhatian yang tinggi pada keamanan data dan informasi. Pada tahun 2025 telah dilakukan implementasi dan sertifikasi keamanan informasi ISO 27001:2022 pada area *Provision of Data Center and Disaster Recovery Center Operations, Tier III Certification of Design Documents*, dan Hasil Verifikasi Kematangan Keamanan Siber (sudah mencapai Level 4 / Terkelola).
- d. Selain menggunakan data center BPS, BPS juga memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) untuk penyediaan layanan TI utamanya untuk layanan TI yang pemanfaatannya melibatkan atau berkerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain.
- e. Karakter pekerjaan pada Direktorat SIS yang tidak harus selalu membutuhkan kehadiran fisik pegawainya menjadikan Direktorat SIS sebagai salah satu unit kerja perluasan uji coba *Flexible Working Arrangement (FWA)*. FWA ini diharapkan memudahkan pegawai dalam fleksibilitas waktu dan tempat bekerja tanpa mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam bekerja serta pencapaian output kinerja yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi; Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran; Potensi dan Permasalahan; serta Sistematika Penyajian Laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Target Kinerja, Perjanjian Kinerja, Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi: Analisis Capaian Kinerja 2025 dan keterbandingan antartahun, Prestasi dan Inovasi 2025, serta Realisasi dan Efisiensi Anggaran Direktorat SIS Tahun 2025.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi Kesimpulan terhadap capaian kinerja Satker yang tercantum





PERENCANAAN KINERJA



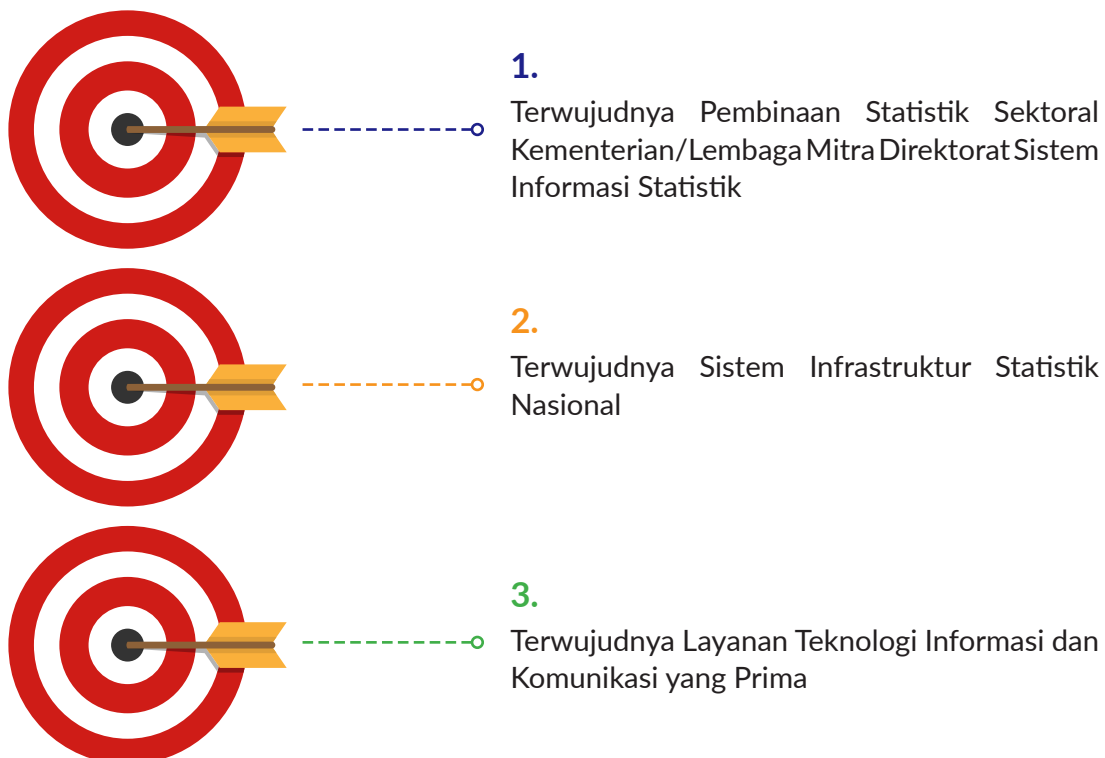
Perencanaan Kinerja

2.1. Visi dan Misi BPS

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis adalah elemen penting dalam perencanaan strategis sebuah organisasi. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029, Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, unit kerja/satuan kerja menetapkan visi dan misinya masing-masing yang selaras dengan visi dan misi BPS melalui proses perumusan yang matang. Namun, disebabkan oleh baru terbitnya dokumen Rencana Strategis BPS, sampai dengan dokumen LAKIN ini disusun, visi dan misi di level unit kerja/satuan kerja belum dapat ditetapkan.

a. Visi dan Misi BPS

VISI : “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Gambar 2.1 Rencana Target Sasaran DSIS 2025

MISI :

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.
2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

b. Tujuan BPS

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien.
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

c. Sasaran Strategis BPS

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.
2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu.
3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

2.2. Target Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik 2025-2029

Target kinerja jangka panjang Direktorat Sistem Informasi Statistik disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik. Target kinerja Direktorat SIS ditetapkan dengan mengacu pada arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS. Selanjutnya Direktorat SIS mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah.

Peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, membawa konsekuensi berupa tuntutan akan ketersediaan sistem informasi yang memudahkan pengguna data statistik untuk memperoleh informasi secara cepat, akurat dan andal. Upaya penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut dari sistem tersebut perlu tetap dilanjutkan mengingat kemajuan perkembangan TI yang sangat pesat, yang disertai dengan meningkatnya volume pekerjaan, bentuk dan variasi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna data.

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur TI baik perangkat keras dan piranti lunak yang mampu mendukung beban kerja seluruh kegiatan menghasilkan statistik baik fungsi pengumpulan data, pengolahan data, diseminasi informasi statistik maupun fungsi pendukung seperti kepegawaian dan keuangan yang semakin meningkat mutlak diperlukan. Untuk itu, BPS telah mengantisipasi hal tersebut dengan membangun infrastruktur TI, di pusat maupun daerah, secara terus menerus dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan administrasi dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Berdasarkan Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Sistem Informasi Statistik 2025-2029, target sasaran kegiatan telah ditetapkan dalam periode tahun 2025-2029. Infrastruktur TI disiapkan melalui kegiatan pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) yang terdiri dari banyak komponen. Komponen SISNAS yang dievaluasi dalam indikator sasaran kegiatan Direktorat SIS di antaranya adalah Aplikasi FASIH (*Flexible Authentic Survey Instrument Harmony*) dan

IPAS (*Integrated Processing and Analysis System*). Setiap tahunnya pada rentang 2025-2029, ditetapkan target untuk sasaran kegiatan terwujudnya SISNAS dengan indikator sasaran kegiatan adalah persentase pengembangan SISNAS secara konstan sebesar 100%. Dengan demikian diharapkan Direktorat SIS dapat merealisasikan seluruh target yang ditetapkan pada setiap awal tahun. Capaian hasil kegiatan akan berbeda-beda untuk setiap tahun tergantung dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan dan keandalan infrastruktur TI maupun infrastruktur pendukung agar dapat bekerja secara optimal, dibutuhkan suatu layanan teknologi informasi dan komunikasi yang prima. Untuk itu, Direktorat SIS menetapkan sasaran kegiatan terwujudnya layanan TIK yang prima dengan tingkat kepuasan layanan teknologi informasi sebagai indikator sasaran kegiatan dengan nilai 80% pada tahun 2025. Hal ini berarti sebanyak 80% dari pengguna layanan TI menganggap layanan yang diberikan oleh Direktorat SIS memuaskan dan mengatasi permasalahan yang dialami. Pada tahun 2029 target yang ditetapkan meningkat sebesar 10% dari target awal 2025 menjadi 90% dengan penambahan secara bertahap yang berkisar antara 2-3% setiap tahunnya.

Sasaran kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat SIS tidak terlepas dari bisnis inti (*core business*) BPS yang di antaranya adalah penyediaan data statistik berkualitas serta pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN). Sasaran yang dimaksud adalah terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral K/L Mitra Direktorat SIS dengan indikator sasaran kegiatan berupa Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral (TKPSS) Direktorat SIS. Indikator TKPSS disusun dari 2 jenis komponen yaitu nilai Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (TPSS) dan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) K/L binaan. Nilai TPSS diperoleh dengan melaporkan dokumentasi kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) pada website dokumentasi PSS, sedangkan nilai IPS K/L diperoleh melalui kegiatan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2025 nilai target kinerja ditetapkan sebesar 59,26 poin yang akan naik secara berangsur meningkat menjadi 78,25 pada akhir periode di tahun 2029.

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan untuk Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik	59,26 poin	69,42 poin	70,25 poin	77,42 poin	78,25 poin
2	Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional	Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	80%	82%	85%	87%	90%

2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat SIS Tahun 2025

Perjanjian kinerja Direktorat SIS tahun 2025 telah ditetapkan dengan mencantumkan sasaran kegiatan berikut indikator kinerja dan targetnya pada tahun 2025. Untuk sasaran kinerja yang berkenaan dengan kegiatan pembinaan statistik sektoral, target ditetapkan senilai 59,26 poin dengan indikator sasarnya adalah tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat SIS. Target sasaran terwujudnya SISNAS, ditetapkan sebesar 100% dengan ukuran yang menjadi indikator sasaran strategis adalah persentase pengembangan SISNAS. Adapun untuk sasaran kegiatan terwujudnya layanan TIK yang prima, target capaian indikator berupa tingkat kepuasan layanan TIK ditetapkan sebesar 80%.

Perjanjian kinerja disepakati oleh kedua belah pihak antara Direktur SIS dan Plt. Deputi Bidang MIS pada tanggal 23 Oktober 2025. Berdasarkan dokumen PK, besaran anggaran telah disediakan untuk program kegiatan 2901 dengan judul kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Statistik sebesar Rp266.850.800.000 Pada tahun 2025, Direktorat SIS hanya menetapkan Indikator Sasaran Kegiatan tanpa Indikator Kinerja Suplemen. Hal ini disebabkan oleh pergantian Renstra yang tidak memuat indikator Kinerja Suplemen.

2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

a. Prioritas Nasional

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai *leading institution* dalam penguatan statistik sektoral melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Peran EPSS semakin strategis seiring dengan perubahan kebijakan SPBE menuju Pemerintah Digital, penetapan Indeks Pemerintah Digital, serta ditetapkannya kinerja urusan statistik sebagai indikator kinerja pemerintah daerah periode 2025–2029 dengan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebagai indikator kunci. Oleh karena itu, pelaksanaan EPSS perlu diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan pemerintah periode 2025 ke depan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan EPSS tahun sebelumnya, termasuk hasil *indepth study* tahun 2024 dan variasi capaian IPS antar instansi, BPS memandang perlu melakukan perbaikan tata kelola dan mekanisme pelaksanaan EPSS ke depan. Oleh karena itu, di tahun 2025 dibentuk Tim Pelaksana EPSS Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 422 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang terdiri dari Dewan Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Kerja. Tim Kerja dibagi ke dalam empat bidang, yaitu Bidang Tata Kelola, Bidang Perubahan Peraturan Badan, Bidang Petunjuk Teknis, dan Bidang Portal serta Sekretariat. Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan, kejelasan regulasi, keseragaman pelaksanaan teknis, serta dukungan sistem informasi dalam pelaksanaan EPSS.

Selain bidang-bidang yang sudah ditentukan, pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga. Tim PSS ini juga melibatkan seluruh unit kerja di BPS, termasuk Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) sebagai tim pembina EPSS yang bertanggungjawab membina berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). K/L mitra binaan Direktorat SIS tahun 2025 di antaranya:

- Kementerian Pertahanan
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
- Ombudsman Republik Indonesia

Target rencana kerja pembinaan PSS dijadwalkan sebanyak 5 kegiatan untuk setiap K/L dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target Rencana Kerja Pembinaan PSS

No	Pertemuan	Rencana Kerja
(1)	(2)	(3)
1	Pertemuan ke-1	Identifikasi Kegiatan Statistik dan Penjelasan Domain 1 (Prinsip SDI)
2	Pertemuan ke-2	Penjelasan Domain 2 (Kualitas Data)
3	Pertemuan ke-3	Penjelasan Domain 3 (Proses Bisnis Statistik)
4	Pertemuan ke-4	Penjelasan Domain 4 (Kelembagaan)
5	Pertemuan ke-5	Penjelasan Domain 5 (Sistem Statistik Nasional)

2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, BPS telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan, salah satunya adalah penyusunan publikasi inflasi. Peran Direktorat SIS dalam penyediaan publikasi inflasi adalah memberikan dukungan sistem pengumpulan data multimoda dalam penyelenggaraan survei terkait inflasi. Upaya ini bertujuan menyediakan data dan indikator terkait dalam rangka pengendalian inflasi.

Penguatan infrastruktur pendukung terus dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan instrumen pengumpulan data berbasis aplikasi FASIH serta penyempurnaan instrumen diseminasi guna mendukung efektivitas publikasi dan promosi data inflasi. Penjaminan kualitas dilaksanakan secara konsisten melalui evaluasi internal berupa rapat evaluasi dan penerapan *Quality Gate* serta evaluasi eksternal melalui mekanisme SIQAF, sehingga proses dan output statistik yang dihasilkan tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

3. Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi

Kegiatan Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi mendukung Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan Tata Kelola Data serta Pengembangan dan Pemanfaatan Emerging Technology. Penentuan target jumlah dan jenis kegiatan statistik yang memanfaatkan Big Data untuk statistik resmi selama periode 2025–2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2025 aktivitas yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan Mobile Positioning Data (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata seperti: Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti Commuter, dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (Metropolitan Statistical Area—MSA).

Dalam hal ini, Direktorat SIS memiliki peranan untuk menyediakan platform dan melakukan pemrosesan big data dengan teknologi Big Data Analytics pada kegiatan statistik tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Big Data Analytics dianggap menjadi salah satu teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE. Big Data Analytics didefinisikan sebagai teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data.

b. Prioritas Presiden

1. Inpres 4 2025 : DTSEN

Dalam melaksanakan mandat Inpres No 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyusunan DTSEN awal, mengelola DTSEN, memutakhirkan DTSEN serta menyampaikan DTSEN kepada Kementerian sebagaimana tersebut dalam Inpres tersebut. Selama tahun 2025, BPS telah berhasil melaksanakan penyusunan DTSEN awal, mengelola DTSEN serta menyampaikan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan DTSEN tersebut tentu saja tidak lepas dari peran Direktorat SIS.

Secara umum Direktorat SIS mempunyai peran dalam menyediakan aplikasi dan infrastruktur TIK, melakukan pemrosesan/pengolahan data, serta menjaga keamanan DTSEN. Berikut adalah peran Direktorat SIS dalam beberapa kegiatan DTSEN 2025:

- Penyusunan Awal DTSEN
 - Melakukan integrasi data 3 (tiga) sumber data DTSEN yaitu data Regsosek dari Bappenas,
 - Melakukan sinkronisasi DTSEN awal dengan data kependudukan Dukcapil.
- Pengelolaan DTSEN
 - Melakukan verifikasi, validasi dan eksplorasi data dari penyedia sumber data saat proses penerimaan data.
 - Melakukan pepadanan sumber data ke dalam DTSEN.
 - Melakukan teknis pembaruan database DTSEN berdasarkan hasil pepadanan data.
 - Melakukan sinkronisasi DTSEN dengan data kependudukan Dukcapil.
 - Melakukan snapshot DTSEN sesuai periode snapshot atau jika ada kebutuhan.
 - Mengimplementasikan model pemeringkatan yang telah disusun oleh Politeknik Statistika (STIS).
- Penyampaian DTSEN

Peran Direktorat SIS dalam penyampaian DTSEN dalam rangka pemanfaatan, pengawasan maupun data balikan adalah menyiapkan snapshot DTSEN pada periode penyampaian serta menyediakan akses DTSEN bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sudah disepakati sebelumnya melalui pembahasan baik *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dukungan penuh juga diberikan oleh Direktorat SIS dalam proses penyusunan regulasi dan tata kelola untuk mendukung DTSEN, diantaranya adalah Peraturan Kepala BPS No 28 Tahun 2025 dan Peraturan Badan tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN No 6 Tahun 2025.

2. Inpres 6 2025 : Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (sampling) menggunakan CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi.

Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus objek pemrosesan data. Teknologi yang digunakan dalam pemrosesan foto tanaman padi pada Survei KSA Padi yaitu Big Data Analytics. Pada Survei KSA

Padi, pemrosesan foto bertujuan menghasilkan data dukung/pembanding dalam menentukan fase tanam padi.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan KSA tersebut Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) memberikan dukungan berupa infrastruktur TIK yang andal. Luasnya cakupan, besarnya jumlah petugas serta karakter data yang dikumpulkan (termasuk gambar) berdampak pada kebutuhan infrastruktur yang tinggi, tidak hanya kemampuan pemrosesan data tetapi juga penyimpanan (*storage*) yang besar, serta *bandwidth* jaringan yang memadai untuk komunikasi data antar perangkat petugas dan Data Center BPS. Direktorat SIS selama tahun 2025 ini telah berhasil memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK kegiatan KSA tersebut sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar.

3. Inpres 8 2025 : Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar K/L/D. Untuk membantu mewujudkan program ini, BPS bertugas menyelenggarakan survei dan menghitung capaian pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui survei SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Dalam rangka menyediakan data dasar yang diperlukan dalam perhitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala, BPS menyelenggarakan SUSENAS setiap bulan Maret dan September tiap tahunnya dengan responden rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kegiatan SUSENAS mencakup tahapan persiapan (persiapan instrumen, sampel, dan pelatihan petugas), pelaksanaan (pemutakhiran, penarikan sampel, pendataan sampel, serta monitoring kegiatan lapangan), serta pengolahan data hingga evaluasi kualitas data di tingkat BPS Kabupaten/Kota serta BPS Provinsi sebelum diserahkan ke BPS RI. Dukungan TI yang diberikan untuk kegiatan SUSENAS adalah penyediaan platform dan infrastruktur TI yang menunjang seluruh lini kegiatan dari perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- Penyediaan aplikasi SOBAT untuk rekrutmen petugas lapangan dan pengolahan survei.
- Penyediaan aplikasi pengolahan pemutakhiran serta pencacahan lengkap survei.
- Aplikasi monitoring yang digunakan untuk pengawasan kegiatan pelaksanaan serta pengolahan data survei.
- Penyediaan aplikasi penjaminan kualitas kegiatan statistik untuk meningkatkan data yang berkualitas dan dapat diandalkan.
- Serta proses kompilasi data final seluruh provinsi untuk disampaikan ke pihak Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya, perhitungan angka kemiskinan dilakukan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan mengolah data final SUSENAS bersama dengan angka penimbang dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, yang selanjutnya digunakan untuk rilis data Profil Kemiskinan Indonesia setiap bulan Januari dan Juli.

4. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui survei khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), *supplier* (penyedia bahan baku), sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG.

Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel.

BPS berkontribusi pada program prioritas ini dengan bertanggung jawab menyelenggarakan Survei Baseline dan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di 38 provinsi. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025.

Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan. Pada kegiatan ini, dukungan TI diberikan melalui penyediaan platform dan infrastruktur TI untuk menunjang seluruh tahapan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- Aplikasi FASIH untuk pengumpulan data pemutakhiran, penarikan sampel, dan pencacahan lengkap di lapangan
- Aplikasi SOBAT untuk rekrutmen petugas survei.
- Dashboard monitoring berbasis web untuk memantau pengumpulan data dan mendeteksi anomali data.
- Aplikasi IPAS untuk mendukung penyajian tabulasi serta analisis data.
- Dukungan terhadap serangkaian aksi penjaminan terhadap produk kegiatan ini berupa penyediaan aplikasi penjaminan kualitas kegiatan statistik yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas data.

c. Isu Strategis Nasional

1. Perpres 12 2025 : Survei Kesejahteraan Petani

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (*Computer-Assisted Personal Interviewing*), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan.

Dalam mendukung pelaksanaan Survei tersebut, Direktorat SIS berperan dalam penyediaan dan pengelolaan ekosistem sistem informasi survei yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan Aplikasi FASIH *Mobile* sebagai sarana pendataan lapangan berbasis CAPI, Web FASIH *Survey Management* untuk pengelolaan operasional survei, Fasih Dashboard untuk pemantauan dan analisis awal data, serta SOBAT BPS untuk mendukung proses rekrutmen dan penugasan mitra statistik. Sistem ini memungkinkan pengelolaan petugas lapangan, penugasan pencacah dan pengawas, pemeriksaan serta perbaikan data secara terstruktur, sekaligus menyediakan informasi perkembangan survei secara *real-time*.

Aplikasi pendukung SKP dikembangkan oleh Direktorat SIS pada tahun 2025 dengan waktu pengembangan sekitar 1,5 bulan dan layanan pengembangan sistem dengan SLA selama 3

bulan, seiring dengan finalisasi kuesioner yang diterima pada akhir Juli 2025. Sistem mulai digunakan pada pertengahan September 2025 dan di-*launching* secara internal pada tanggal 14 September 2025. Evaluasi awal telah dilakukan melalui pengumpulan masukan dari unit teknis terkait untuk perbaikan pada pelaksanaan survei berikutnya. Pemanfaatan sistem direncanakan untuk dilanjutkan pada pelaksanaan SKP tahun 2026, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebijakan kegiatan, dengan tetap mengandalkan teknologi FASIH dan SOBAT sebagai platform utama dalam mendukung kualitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pelaksanaan survei.

2. UU No 16 Tahun 1997 : Sensus Ekonomi

Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang statistik mengamankan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan statistik dasar. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro. Dalam pelaksanaan statistik dasar tersebut BPS juga diamanahi untuk melaksanakan tiga sensus, yaitu Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi.

Pada tahun 2025 ini BPS sudah memulai persiapan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026), dimana pada tahun 2025 BPS melaksanakan gladi bersih sensus ekonomi 2026. Dalam pelaksanaan Gladi Bersih BPS melakukan simulasi kegiatan sensus ekonomi mulai dari perencanaan, pengumpulan data hingga penyusunan hasil berupa tabulasi. Untuk mendukung kegiatan gladi bersih tersebut Direktorat SIS memberikan banyak dukungan, yaitu sebagai berikut:

- Dukungan dalam pembentukan *prelist* SE 2026 bersama-sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS);
- FRS (MFD *online*) untuk menjalankan proses pemutakhiran kerangka wilayah melalui mekanisme yang terstruktur dan bersiklus;
- FASIH merupakan salah satu dukungan inti dari Direktorat SIS dalam hal pengumpulan data SE 2026, mulai dari pendesainan kuesioner, pengumpulan data multiplatform, dashboard pendataan dan anomali, hingga pemanfaatan Gen AI dalam hal penentuan KBLI usaha;
- SOBAT merupakan aplikasi pengelolaan mitra statistik dalam berbagai kegiatan sensus/survei yang mendukung pengelolaan mitra yang terintegrasi, guna menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel. SOBAT berperan strategis pada tahapan rekrutmen, penetapan, dan penugasan petugas, yaitu sebelum proses pengumpulan data;
- *Integrated Processing and Analysis System* (IPAS) merupakan platform terpadu untuk pemrosesan dan analisis data. Dalam pelaksanaan Gladi Bersih Sensus Ekonomi 2026, IPAS digunakan sebagai salah satu komponen dukungan teknologi informasi untuk mengolah data hasil pendataan;
- Maritemen merupakan aplikasi yang menyediakan kapabilitas layanan secara sistematis dalam menjalankan dan mengelola rangkaian kegiatan manajemen risiko. Maritemen digunakan untuk mengelola risiko pada pelaksanaan gladi bersih SE 2026 dan juga kegiatan SE 2026 nantinya;
- Pengujian aplikasi memiliki tugas dan fungsi secara umum untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa aplikasi atau produk perangkat lunak yang dikembangkan secara in-house oleh tim developer BPS baik di Pusat, Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota berfungsi dengan benar, aman dan efisien sesuai dengan persyaratan spesifiknya. Pengujian dilakukan untuk aplikasi-aplikasi pendukung SE 2026.

3. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri

sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif.

Dalam penyusunan neraca ini, Direktorat Sistem Informasi Statistik berperan dalam menyediakan dukungan teknologi informasi untuk mendukung proses integrasi data, pengolahan, serta penyajian hasil analisis secara terstruktur dan berkelanjutan. Dukungan ini dilaksanakan dengan mengacu pada kebutuhan statistik sektoral dan kerangka kerja *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*, serta sejalan dengan pengembangan *Ocean Satellite Accounts* melalui pemanfaatan *Platform for Analytical System and Trend Intelligence (PASTI)*, yang mencakup:

- **Integrasi Data Neraca Sumber Daya Laut (NSDL)**
DSIS mendukung proses integrasi data Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) yang berasal dari berbagai sumber data administratif dan statistik sektoral. Integrasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi, keterbandingan, dan keterlacakan data yang digunakan dalam penyusunan neraca lingkungan, termasuk keterkaitannya dengan neraca arus energi dan emisi GRK. Melalui pendekatan integrasi sistem, DSIS membantu menyatukan data dari Kementerian/Lembaga terkait ke dalam satu kerangka pengelolaan data yang terstandar, sehingga mendukung analisis lintas sektor dan mempermudah pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan berbasis bukti.
- **Pengembangan Visualisasi Data dan Dashboard**
Sebagai bagian dari dukungan analitis, DSIS mengembangkan visualisasi data dan dashboard interaktif melalui Platform PASTI untuk menyajikan hasil Neraca Arus Energi, Emisi GRK, dan NSDL secara informatif dan mudah dipahami. Dashboard ini dirancang untuk membantu pengguna, baik internal BPS maupun pemangku kepentingan eksternal, dalam memantau tren, membandingkan indikator, serta mengeksplorasi keterkaitan antara aktivitas ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, dan dampak lingkungan. Dengan visualisasi yang terintegrasi, proses diseminasi data menjadi lebih efektif dan mendukung transparansi serta pemanfaatan statistik lingkungan dalam pengambilan keputusan.

4. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Dalam mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas untuk klaster komoditas pangan strategis (Gula, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih), Direktorat Sistem Informasi Statistik berperan dalam penyediaan dan pengelolaan data komoditas pangan strategis yang terintegrasi, akurat, dan tepat waktu. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem informasi statistik, penjaminan kualitas dan konsistensi data lintas sumber, serta fasilitasi integrasi data antarinstansi. Output dari peran ini berupa tersedianya data dan informasi neraca komoditas pangan strategis yang andal sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan, perencanaan kebutuhan pangan nasional, dan pengambilan kebijakan untuk menjaga stabilitas pangan.

Sementara itu, dalam mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional untuk klaster komoditas garam, Direktorat Sistem Informasi Statistik berperan dalam penyediaan dan pengelolaan data pergaraman nasional yang terintegrasi dan berkualitas. Peran ini dilaksanakan melalui penguatan sistem informasi statistik pergaraman, peningkatan kualitas dan konsistensi data produksi dan pasokan garam, serta dukungan integrasi data lintas pemangku kepentingan. Output dari peran ini berupa tersedianya data pergaraman nasional yang akurat dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi ketersediaan garam dan perumusan kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional.

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Direktorat SIS pada tahun 2025 dibiayai dengan APBN Tahun 2025. Pemanfaatan anggaran digunakan untuk mencapai kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu:

- Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik dengan indikator kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik sebesar 59,62 poin.
- Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional dengan indikator kinerja Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) sebesar 100% dan
- Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 80%.

Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2025 dialokasikan melalui APBN Tahun 2025 dengan pagu anggaran total sebesar Rp316.519.882.000. Dari total pagu tersebut, dilakukan kebijakan self blocking sebesar Rp1.787.649.000, sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp314.722.233.000 atau 99,43 persen dari pagu total. Pagu anggaran yang dapat digunakan ini menjadi dasar pembiayaan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Direktorat Sistem Informasi Statistik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025.

Berdasarkan sasaran strategis, pagu anggaran untuk *Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik* tidak menggunakan anggaran (efisiensi) dikarenakan kegiatan dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas. Sasaran *Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional* memiliki pagu anggaran sebesar Rp876.681.000 dengan *self blocking* sebesar Rp450.468.000, sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp426.213.000 atau 48,61 persen. Sementara itu, sasaran *Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima* memperoleh pagu anggaran terbesar, yaitu Rp315.643.201.000, dengan *self blocking* sebesar Rp1.347.181.000, sehingga pagu yang dapat digunakan mencapai Rp314.296.020.000 atau 99,57 persen. Pengalokasian pagu yang dapat digunakan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.3. Pagu Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Self Blocking (Rp)	Pagu yang Dapat Digunakan (Rp)	Persentase Pagu Anggaran Dengan Selfblocking (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik	0	0	0	-
Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional	876.681.000	450.468.000	426.213.000	48,61
Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	315.643.201.000	1.347.181.000	314.296.020.000	99,57
Total	316.519.882.000	1.797.649.000	314.722.233.000	99,43





AKUNTABILITAS KINERJA

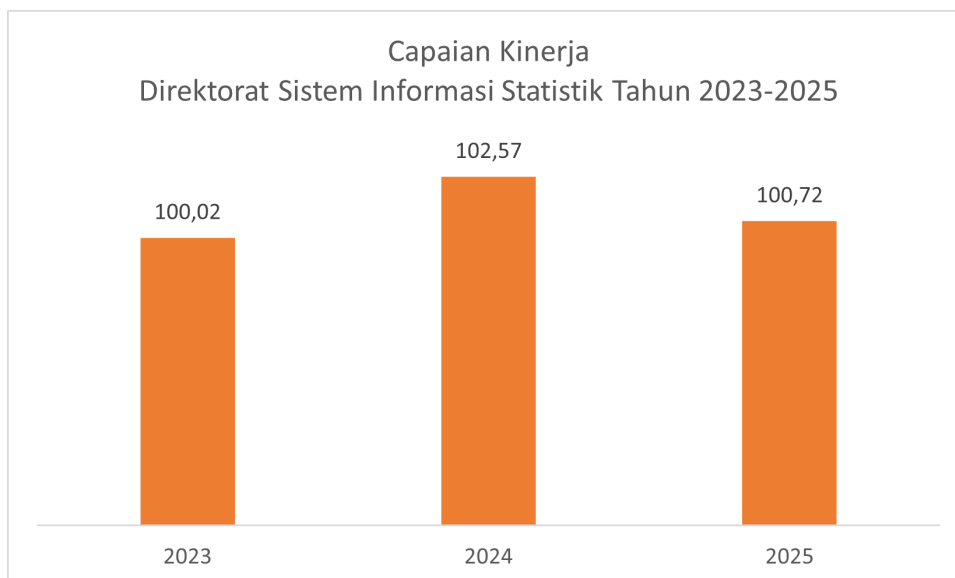


Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Direktorat SIS merupakan perwujudan kewajiban Direktorat SIS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Direktorat. Akuntabilitas ini kemudian dituangkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat SIS dilakukan sesuai dengan Rencana Strategis seperti tertulis pada Bab II.

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat SIS Tahun 2025

a. Perbandingan Capaian Kinerja Total Selama 2023-2025



Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Total Direktorat SIS selama Tahun 2023-2025

Berdasarkan grafik capaian kinerja total Direktorat Sistem Informasi Statistik tahun 2023–2025, terlihat bahwa capaian kinerja secara konsisten berada pada level yang baik dan relatif stabil. Pada tahun 2023, capaian kinerja tercatat sebesar **100,02**, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi **102,57**, yang menunjukkan adanya penguatan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan program serta kegiatan. Pada tahun 2025, capaian kinerja berada pada angka **100,72**, yang meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetap menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik terjaga di atas target dan berada dalam kategori baik. Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode 2023–2025 mencerminkan konsistensi pelaksanaan kinerja, kemampuan adaptasi

terhadap dinamika pelaksanaan program, serta komitmen berkelanjutan dalam menjaga kualitas dan efektivitas kinerja dari tahun ke tahun.

b. Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat Utama, Pada tahun 2025 Direktorat SIS memperoleh nilai kinerja organisasi sebesar **90,64%** dengan predikat **“Baik”**. Pencapaian nilai kinerja sebesar 90,64 % menunjukkan bahwa Direktorat SIS berhasil memenuhi sebagian besar target indikator kinerja dan menunjukkan tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Dalam konteks Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024, kategori **“Baik”** mencerminkan bahwa kinerja organisasi secara keseluruhan berada di atas standar minimal yang diharapkan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan menuju kategori yang lebih tinggi seperti **“Istimewa”**. Nilai ini menggambarkan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan operasional Direktorat SIS telah dijalankan secara efektif dan efisien dengan tingkat pemenuhan output yang signifikan.

Secara substansial, capaian **90,64%** menunjukkan bahwa mayoritas sasaran strategis telah terealisasi sesuai rencana. Hal ini mencerminkan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar unit, serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Direktorat SIS mampu mengantisipasi tantangan operasional dan mengimplementasikan langkah perbaikan sepanjang periode penilaian kinerja. Keberhasilan ini juga menunjukkan komitmen manajemen dan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.1. Predikat PKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Tabel 3.2. Interpretasi Predikat PKO

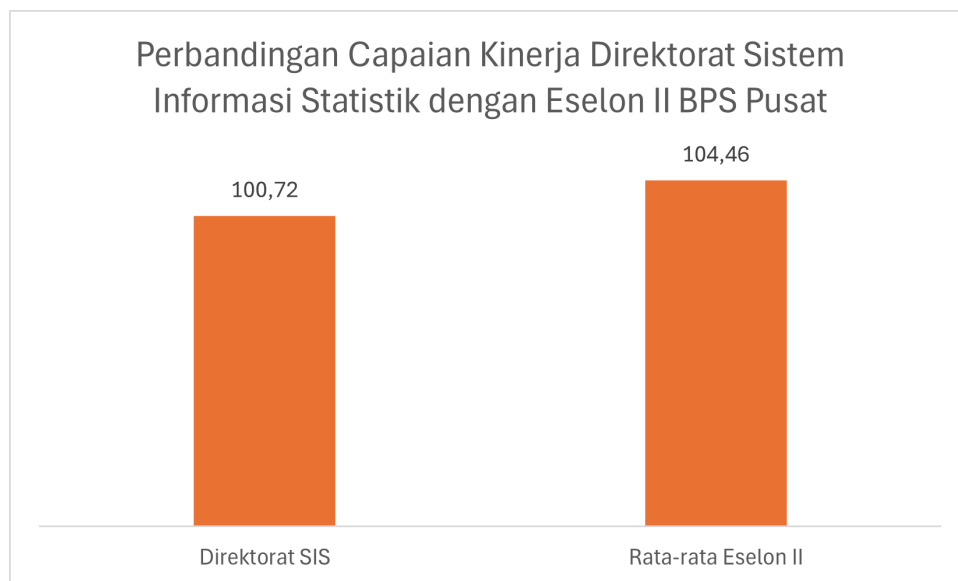
Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/ unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/ target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/ target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/ target.

Meskipun termasuk dalam kategori **“Baik”**, nilai **90,64 %** juga menandakan adanya area kinerja yang belum optimal atau target yang belum sepenuhnya tercapai. Organisasi khususnya Direktorat SIS

perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator atau program yang belum mencapai target maksimal. Hal ini penting agar Direktorat SIS dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih spesifik dan inovatif pada periode berikutnya sehingga dapat beranjak ke kategori **"Istimewa"**.

Secara umum, capaian ini memiliki implikasi positif terhadap persepsi publik dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Kategori **"Baik"** menjadi bukti kinerja yang kredibel dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap institusi. Namun, Direktorat SIS tetap perlu menjaga momentum perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui pembelajaran dari capaian saat ini, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi proses kerja, serta pemantauan berkala terhadap indikator kinerja. Dengan demikian, Direktorat SIS semakin siap menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang lebih kompleks di masa depan.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik dengan Rata-Rata Eselon II BPS Pusat



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik dengan Rata-Rata Eselon II BPS Pusat

Berdasarkan hasil *benchmarking* capaian kinerja tahun 2025, Direktorat Sistem Informasi Statistik mencatat nilai capaian kinerja sebesar **100,72**, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon II BPS Pusat sebesar **104,46**. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja Direktorat SIS telah mencapai target dan berada pada kategori **"Baik"**, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat sejajar atau melampaui rata-rata Eselon II.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, Direktorat SIS perlu terus memperkuat penajaman perencanaan agar lebih selaras dengan sasaran strategis organisasi, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas unit sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara lebih proaktif. Selain itu, percepatan penyelesaian kegiatan prioritas, peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi proses kerja, serta penguatan kapasitas dan manajemen beban kerja tim diharapkan dapat mendorong peningkatan capaian kinerja secara lebih signifikan. Upaya perbaikan berkelanjutan tersebut menjadi langkah penting agar kinerja Direktorat SIS pada periode selanjutnya dapat semakin lebih baik dan mendekati bahkan melampaui rata-rata Eselon II BPS Pusat.

d. Perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025

Tabel 3.3. Perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian /Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik										102,10
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)		59,26	N/A (Belum dijadikan indikator)		60,50	N/A (Belum dijadikan indikator)		102,10
Sasaran 2. Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional										100,00
Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		100	N/A (Belum dijadikan indikator)		100	N/A (Belum dijadikan indikator)		100,00
Sasaran 3. Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima										100,05
Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		80	N/A (Belum dijadikan indikator)		80,04	N/A (Belum dijadikan indikator)		100,05

Capaian kinerja organisasi untuk Direktorat SIS pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal pada 3 (tiga) sasaran utama. Untuk sasaran Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik capaian sebesar 102,10 persen, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral kepada Kementerian/Lembaga mitra telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh tersedianya dukungan sistem informasi statistik yang andal, pelaksanaan pembinaan, dan fasilitasi teknis secara efektif. Direktorat Sistem Informasi Statistik juga berperan aktif dalam memastikan ketersediaan dan keandalan sistem yang mendukung pengelolaan dan pertukaran data statistik sektoral, sehingga mampu memperkuat koordinasi, integrasi, dan kualitas statistik sektoral secara nasional.

Untuk sasaran Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional capaian sebesar 100,00 persen, menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional telah berhasil direalisasikan sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan keberhasilan Direktorat Sistem Informasi Statistik dalam menyediakan, mengelola, dan memastikan keberlangsungan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik nasional. Infrastruktur yang tersedia telah mampu mendukung kebutuhan pengolahan data, penyimpanan, serta operasional sistem statistik secara optimal, sehingga berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan statistik dan peningkatan kualitas layanan statistik secara nasional.

Begitu juga dengan sasaran Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima capaian sebesar 100,05 persen, menunjukkan bahwa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik telah berjalan dengan sangat baik dan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui tersedianya layanan sistem informasi, jaringan, dan dukungan teknis yang andal, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung operasional kegiatan statistik. Keandalan layanan TIK tersebut berperan penting dalam memastikan

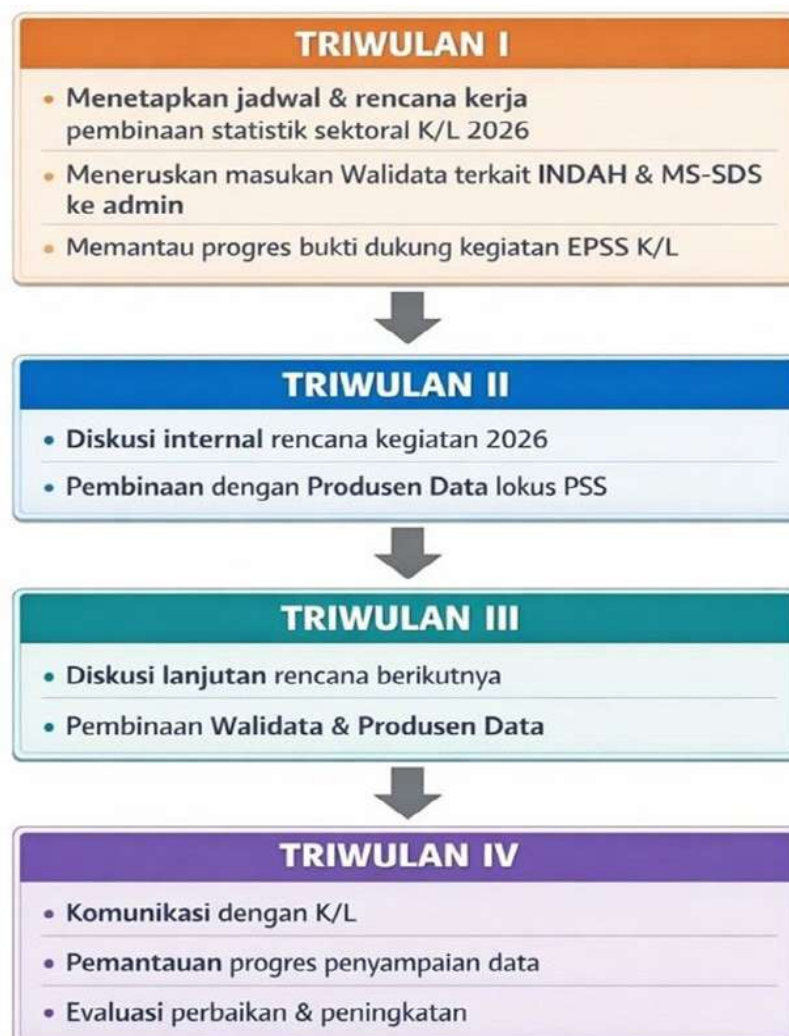
kelancaran operasional sistem, mendukung pengguna internal maupun eksternal, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan organisasi secara keseluruhan.

e. Analisis Capaian Kinerja 2025 per IKU

■ Indikator 1: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik

Sepanjang Triwulan I–IV tahun 2025, kendala utama pembinaan statistik sektoral meliputi terbatasnya pertemuan dengan K/L akibat efisiensi anggaran, penambahan K/L baru dengan petunjuk teknis yang belum lengkap, serta perubahan SOTK yang berdampak pada penugasan PIC walidata. Selain itu, masih terdapat tantangan berupa ketatnya birokrasi dan rendahnya pemahaman produsen data, keterbatasan kesigapan dalam pemenuhan dokumen bukti dukung, serta menunggu kesiapan walidata dan produsen data untuk kegiatan pembinaan lanjutan.

Sepanjang Triwulan I–IV, solusi yang dilakukan berfokus pada penguatan koordinasi, perencanaan, dan komunikasi pembinaan statistik sektoral. Upaya tersebut meliputi konsultasi intensif dengan DDS serta pelengkapan dokumentasi internalisasi dan edukasi, penyusunan perencanaan kegiatan PSS yang terstruktur untuk setiap K/L, dan penguatan peran PIC walidata serta keterlibatan produsen data. Selain itu, dilakukan evaluasi dan pemantauan pemenuhan dokumen bukti dukung, penjadwalan ulang pembinaan melalui komunikasi berkelanjutan,



Gambar 3.3 Rencana Tindak Lanjut Indikator Sasaran Kegiatan 1

klarifikasi kendala aplikasi dengan admin INDAH dan MS-SDS, serta penyempurnaan metode pembinaan melalui revidi dan pemadatan materi yang difokuskan pada peningkatan indikator EPSS K/L dengan capaian rendah.

Rencana tindak lanjut tahun 2026 disusun secara bertahap dan sistematis sepanjang Triwulan I hingga Triwulan IV guna memastikan pembinaan statistik sektoral berjalan terarah, berkesinambungan, dan tepat sasaran. Pada Triwulan I, fokus utama diarahkan pada tahap perencanaan dan penguatan fondasi kegiatan, yaitu dengan menetapkan jadwal serta menyusun rencana kerja pembinaan statistik sektoral K/L tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan Walidata untuk mendapatkan masukan terkait aplikasi INDAH dan MS-SDS sehingga perbaikan sistem dapat dilakukan melalui admin sehingga dukungan teknologi dapat lebih optimal. Selain itu, dilakukan pemantauan awal terhadap progres penyediaan bukti dukung kegiatan EPSS K/L sebagai langkah mitigasi risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian dokumen sejak dini.

Memasuki Triwulan II dan III, kegiatan difokuskan pada penguatan koordinasi, evaluasi, dan implementasi pembinaan. Pada Triwulan II dilaksanakan diskusi internal untuk menyepakati dan memantapkan rencana kegiatan selama tahun 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan pembinaan bersama produsen data pada lokus PSS yang menjadi target. Selanjutnya, pada Triwulan III diskusi internal dilanjutkan untuk menyesuaikan rencana kegiatan berikutnya berdasarkan hasil pelaksanaan sebelumnya, disertai pembinaan yang melibatkan Walidata dan Produsen Data guna mengevaluasi serta memantau pemenuhan dokumen bukti dukung. Tahapan ini menjadi dasar penting sebelum memasuki Triwulan IV, yang difokuskan pada komunikasi intensif dengan K/L dalam rangka memantau progres penyampaian data serta melakukan evaluasi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan statistik sektoral secara menyeluruh.

■ Indikator 2: Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)

Secara umum, pengembangan FASIH menghadapi kendala utama pada aspek akses infrastruktur, stabilitas layanan, dan kesiapan sumber daya. Proses *hot fix* dan *deployment* masih kurang fleksibel karena akses server produksi harus melalui *environment development*, sehingga memperlambat penanganan isu. Selain itu, gangguan dan ketidakstabilan Pusat Data Nasional (PDN) berulang kali menyebabkan beberapa layanan tidak dapat diakses serta menghambat proses pengembangan dan produksi. Dari sisi infrastruktur, kapasitas dan kesiapan *Data Center* (DC) belum optimal, termasuk untuk mendukung pengembangan AI pada FASIH, sehingga diperlukan peremajaan infrastruktur yang berdampak pada kebutuhan migrasi dan *downtime*. Tantangan lain muncul pada aspek keamanan dan jaringan, seperti pemblokiran IP perusahaan karena terdeteksi sebagai IP luar negeri. Di sisi SDM, masih terdapat keterbatasan tenaga pengembang, khususnya untuk pengembangan FASIH *Mobile* berbasis iOS.

Pengembangan IPAS secara konsisten menghadapi kendala pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, baik di DC maupun PDN. Infrastruktur yang tersedia belum memadai sehingga IPAS belum direkomendasikan untuk digunakan secara optimal, terutama untuk kebutuhan pemrosesan berat seperti *Machine Learning* dan *Deep Learning*. Selain itu, stabilitas akses PDN yang kurang baik turut memengaruhi performa dan keandalan aplikasi. Dari sisi aplikasi, terdapat kendala signifikan pada performa dan waktu respon, yang belum sesuai dengan ekspektasi pengguna. Perbedaan kapasitas antara *actual core* dan *virtual core* PDN turut memengaruhi kinerja aplikasi hasil inovasi. Kendala lain yang cukup krusial adalah belum tersedianya metadata secara memadai, khususnya sebagai *knowledge base* dalam pengembangan AI dan chatbot. Selain itu, akses *source code*, server kolaborasi, serta dokumentasi fungsi dan formula (R dan Python) masih terbatas, sehingga menghambat proses pengembangan, pemeliharaan, dan transfer pengetahuan.

Solusi pengembangan FASIH difokuskan pada penanganan gangguan layanan, peningkatan

stabilitas infrastruktur, serta kesiapan operasional dan SDM. Pada tahap awal, mitigasi dilakukan melalui *rollback* sistem yang diikuti dengan *hot fix*, sebagai langkah cepat untuk memulihkan layanan. Ketika terjadi gangguan akses, dilakukan asistensi kepada pengguna/responden untuk mengganti koneksi serta koordinasi intensif dengan tim infrastruktur dan admin PDN guna percepatan penyelesaian masalah. Untuk meningkatkan keberlanjutan layanan, dilakukan penyesuaian dan *tuning environment development*, pemulihan layanan pengembangan, serta pemanfaatan sementara platform yang digunakan oleh tim Gen AI dan IPAS. Selain itu, disusun rencana strategis pemindahan sebagian fitur ke DC, dengan target mayoritas fitur direlokasi pada tahun berikutnya. Dalam rangka meminimalkan dampak operasional, dilakukan koordinasi



Gambar 3.4 Rencana Tindak Lanjut Indikator Sasaran Kegiatan 2

penjadwalan *downtime* dengan unit pengolahan. Dari sisi kapasitas tim, dilakukan optimalisasi SDM, khususnya untuk mendukung pengembangan FASIH *Mobile* berbasis iOS.

Solusi pengembangan IPAS diarahkan pada optimalisasi pemrosesan, peningkatan performa aplikasi, serta penguatan metadata dan dokumentasi. Pada tahap awal, seluruh proses pengolahan data dilakukan di PDN sebagai solusi sementara keterbatasan infrastruktur, disertai eksplorasi teknis lanjutan untuk mencapai target kinerja visualisasi data. Penanganan gangguan juga dilakukan melalui koordinasi langsung dengan admin PDN. Untuk mengatasi keterbatasan metadata, dilakukan pemenuhan metadata secara bertahap, termasuk penggunaan alternatif metadata yang bersumber dari kuesioner dan rincian kolom pertanyaan FASIH. Selain itu, dikembangkan dan diimplementasikan IPAS-CM (*Content Management*) sebagai sarana dokumentasi fungsi dan formula secara dinamis, guna mendukung keberlanjutan pengembangan dan transfer pengetahuan. Pada tahap lanjutan, dilakukan diskusi lintas tim untuk mencari alternatif solusi dan perancangan implementasi dengan infrastruktur baru, serta optimasi resource untuk kebutuhan komputasi berat. Langkah-langkah ini ditujukan untuk meningkatkan stabilitas, performa, dan skalabilitas IPAS secara berkelanjutan.

Pada Triwulan I, rencana tindak lanjut difokuskan pada penguatan fondasi teknis dan kesiapan awal FASIH dan IPAS dalam mendukung kebutuhan strategis, khususnya menuju pelaksanaan SE2026. Pengembangan FASIH diarahkan pada perluasan kanal pengumpulan data melalui pengembangan iOS untuk pencacah, keberlanjutan PAPI dan *Web Entry*, serta penyempurnaan *frontend* FASIH SM. Optimalisasi dashboard dan pengembangan fitur *tracking* menjadi langkah penting untuk meningkatkan visibilitas proses survei dan pengendalian lapangan. Sementara itu, pada IPAS, pengembangan *AI-agent* untuk *Insight Generator*, *anomaly detection* berbasis *unsupervised learning*, serta implementasi IPAS-CM dan penyesuaian *resource* Spark menunjukkan upaya awal untuk memperkuat kemampuan analitik, dokumentasi, dan skalabilitas sistem pengolahan data.

Memasuki Triwulan II, fokus pengembangan beralih pada peningkatan performa, integrasi lintas kanal, serta penguatan tata kelola dan keamanan sistem. Pada FASIH, berbagai optimasi dilakukan untuk memastikan konsistensi dan efisiensi pengolahan data melalui pengembangan fitur delta data pada seluruh moda (FASIH Form, CAPI, CAWI, dan PAPI), migrasi *backend* dan *elasticsearch*, serta penyempurnaan dashboard *real-time* dan monitoring SE2026. Penguatan dokumentasi teknis, manajemen keamanan, dan perlindungan data pribadi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sistem. Sejalan dengan itu, IPAS dikembangkan untuk mendukung pemrosesan data skala besar dan kompleks melalui *asynchronous processing* berbasis *message broker*, *data analysis pipelining*, serta pemanfaatan AI dan *computer vision* untuk klasifikasi citra, prediksi, dan validasi ulang data dari FASIH.

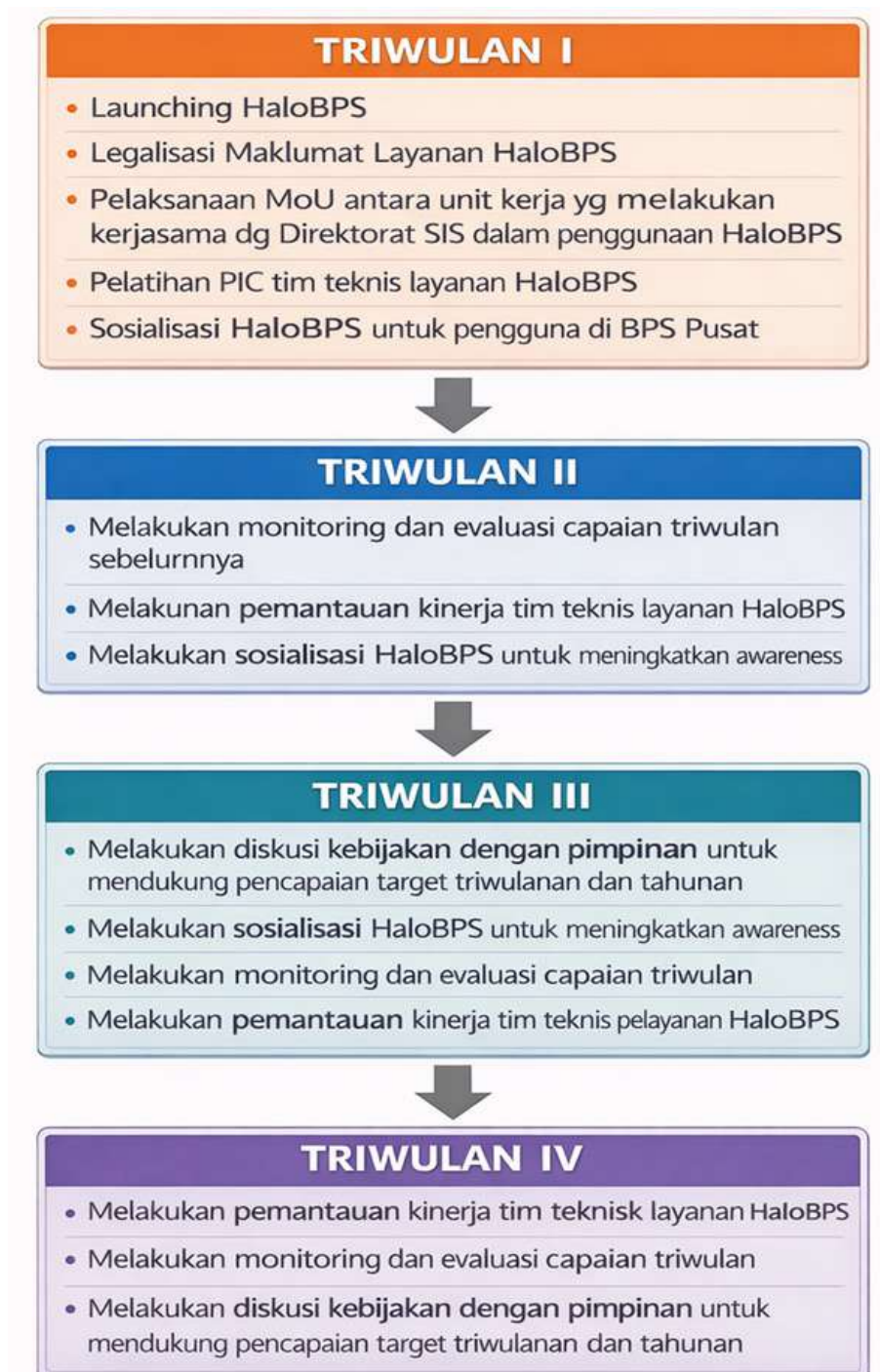
Pada Triwulan III, rencana tindak lanjut difokuskan pada peningkatan fleksibilitas, integrasi sistem, dan penguatan kontrol akses pengguna. FASIH dikembangkan lebih adaptif melalui *Interactive Script Builder* yang terintegrasi dengan proses sampling, manajemen upload sampel berbasis Kafka, serta integrasi dengan CAWI SSO dan SOBAT. Penguatan aspek keamanan dan manajemen akses dilakukan melalui perbaikan potensi celah IDOR dan integrasi *access control* dengan dashboard pengguna. Sementara itu, IPAS diarahkan pada penguatan kolaborasi dan manajemen pengetahuan melalui pengembangan IPAS Forum, pemanfaatan AI untuk peringkasan konten, serta penyempurnaan *backend* pengaturan region dan manajemen *AI-agent* agar lebih terstruktur dan terkelola.

Pada Triwulan IV, pengembangan FASIH dan IPAS memasuki tahap pematangan dan penyempurnaan ekosistem *end-to-end*. FASIH difokuskan pada pengelolaan siklus hidup pengguna dan survei, integrasi metadata dan *Question Designer*, penguatan keamanan lanjutan, serta peningkatan fleksibilitas melalui multi-language form, desain pertanyaan baru, dan manajemen kapasitas sistem. Integrasi dengan berbagai sistem pendukung seperti DMS, FRS, dan QD memastikan kesinambungan data dan proses bisnis. Di sisi IPAS, pengembangan diarahkan pada penguatan metadata, penyediaan modul perhitungan indikator, pengembangan IPAS S3, serta penerapan flow reporting dan model AI untuk analisis data. Tahapan ini menandai

kesiapan FASIH dan IPAS sebagai platform terintegrasi yang matang, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi statistik dan analitik data organisasi.

■ Indikator 3: Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sepanjang Triwulan I hingga IV, kendala utama dalam penyelenggaraan layanan TI berfokus pada partisipasi pengguna, pengelolaan tiket layanan, serta kesiapan SDM teknis. Tingkat pengisian survei kepuasan layanan TI masih rendah, di mana banyak pengguna tidak memberikan umpan balik secara mandiri dan cenderung meninggalkan tiket setelah layanan selesai. Akibatnya, sebagian besar feedback yang terekam merupakan hasil *push feedback* dari sistem. Dari sisi operasional, masih banyak ditemukan tiket nyasar di luar ruang lingkup layanan TI yang masuk ke HaloSIS, seperti pengajuan pembatalan cuti pada SIPECUT yang seharusnya ditangani



Gambar 3.5 Rencana Tindak Lanjut Indikator Sasaran Kegiatan 3

oleh admin Biro SDM. Selain itu, terjadi *overload* tiket, khususnya terkait insiden email dan layanan tertentu seperti SIPECUT, yang berdampak pada meningkatnya beban kerja tim teknis. Meskipun intensitas *overload* mulai menurun pada triwulan berikutnya, volume tiket yang tinggi tetap menimbulkan kendala dalam penanganan tepat waktu. Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah ketidakpatuhan terhadap SLA layanan, ditandai dengan masih banyaknya tiket berstatus *assigned* atau *in progress* lebih dari tiga hari kerja, meskipun secara administratif tiket telah dirujuk tepat waktu oleh operator HaloSIS. Keterbatasan jumlah personel tim teknis juga menjadi kendala, terutama pada Triwulan IV, serta belum terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi teknis bagi PIC tim layanan dan PIC BPS Provinsi, yang berdampak pada efektivitas dan konsistensi penanganan layanan.

Upaya penyelesaian permasalahan layanan TI sepanjang Triwulan I hingga IV difokuskan pada peningkatan partisipasi pengguna, penataan pengelolaan tiket, serta penguatan kapasitas layanan dan SDM teknis. Untuk meningkatkan respon survei kepuasan, telah dilakukan *reminder* dan pencantuman *disclaimer* pada aplikasi HaloSIS, sehingga pengguna yang tidak mengisi survei dianggap memberikan *feedback* “puas”. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan *awareness* penggunaan email guna menekan insiden berulang yang memicu *overload* tiket. Dalam pengelolaan tiket, proses penyelesaian layanan tetap berjalan dengan peran aktif operator HaloSIS dalam mengarahkan tiket ke *Subject Matter* yang tepat, serta penambahan alokasi petugas oleh tim MLTI untuk mempercepat respon layanan. Sebagai langkah perbaikan sistem layanan terpadu, dilakukan *soft launching* hingga kesiapan *launching* HaloBPS, setelah melewati tahapan pengujian oleh tim layanan pengujian. Pada aspek tata kelola layanan, telah dilakukan pembaruan katalog layanan, termasuk penambahan dan penyesuaian jenis layanan menjadi Layanan Pengujian Aplikasi dan Layanan Pengujian Keamanan Aplikasi. Selain itu, dilaksanakan pemantauan dan pengawasan progres tiket secara rutin dengan pelaporan mingguan, serta penyampaian notifikasi dan informasi layanan melalui email dan kanal komunitas BPS.

Rencana tindak lanjut pada Triwulan I difokuskan pada tahap inisiasi dan penguatan fondasi layanan HaloBPS. Kegiatan utama meliputi *launching* HaloBPS sebagai titik awal operasional layanan, dilanjutkan dengan legalisasi Maklumat Layanan untuk memastikan kejelasan standar dan komitmen pelayanan. Pada tahap ini juga direncanakan akan dilakukan pelaksanaan MoU antara Direktorat SIS dan unit kerja terkait sebagai dasar formal kerja sama pemanfaatan HaloBPS. Untuk menjamin kesiapan operasional, direncanakan akan dilaksanakan pelatihan bagi PIC tim teknis layanan, serta sosialisasi kepada pengguna di lingkungan BPS Pusat guna memperkenalkan fungsi, manfaat, dan mekanisme layanan HaloBPS secara menyeluruh.

Memasuki Triwulan II dan Triwulan III, rencana tindak lanjut diarahkan pada penguatan implementasi, peningkatan kinerja, dan perluasan pemanfaatan layanan. Pada Triwulan II dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Triwulan I sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, disertai pemantauan kinerja tim teknis untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Kegiatan sosialisasi HaloBPS terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan *awareness* dan tingkat pemanfaatan layanan. Selanjutnya, pada Triwulan III, selain melanjutkan monitoring, evaluasi, dan pemantauan kinerja, dilakukan pula diskusi kebijakan dengan pimpinan sebagai upaya strategis untuk memastikan dukungan kebijakan terhadap pencapaian target triwulanan dan tahunan layanan HaloBPS.

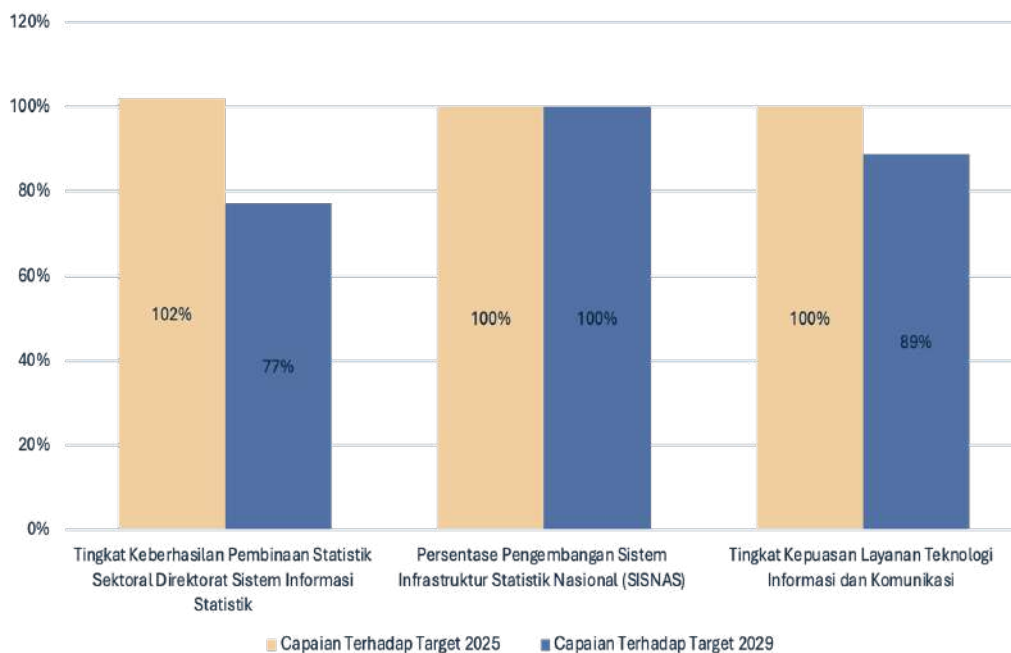
Pada Triwulan IV, rencana tindak lanjut difokuskan pada konsolidasi dan penguatan keberlanjutan layanan HaloBPS. Pemantauan kinerja tim teknis dan monitoring serta evaluasi capaian triwulan sebelumnya tetap dilakukan untuk memastikan konsistensi kualitas layanan hingga akhir tahun. Selain itu, diskusi kebijakan dengan pimpinan kembali dilaksanakan sebagai sarana evaluasi strategis dan perumusan arah kebijakan ke depan, sehingga hasil pelaksanaan HaloBPS sepanjang tahun dapat menjadi dasar peningkatan layanan dan pencapaian target kinerja pada periode selanjutnya.

3.2. Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra

Tabel 3.4. Capaian Kinerja BPS Terhadap Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian /Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik						
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik	Poin	59,26	78,25	60,50	102,10	77,32
Sasaran 2. Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional						
Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 3. Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima						
Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	80	90	80,04	100,05	88,93

Perbandingan Capaian Indikator Terhadap Target Tahun 2025 dan 2029



Gambar 3.6 Perbandingan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2025 dan 2029

■ Indikator 1: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik

• Faktor Pendorong Ketercapaian Target

Capaian Indikator Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik pada tahun 2026 yang mencapai 60,50 poin menunjukkan kinerja yang melampaui target tahun 2025 sebesar 59,26 poin, dengan tingkat capaian 102,10 persen. Faktor utama yang mendorong ketercapaian ini adalah koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh tim PSS Direktorat SIS dengan K/L yang menjadi lokus pembinaan serta pemantauan yang dilakukan secara lebih efisien dan terukur. Mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur, forum koordinasi yang rutin, serta dukungan kebijakan dari pimpinan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembinaan statistik sektor. Kolaborasi ini membantu menyamakan pemahaman, meningkatkan komitmen, serta mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pembinaan.

Faktor pendorong lainnya adalah dukungan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan perencanaan yang lebih matang. Peningkatan kompetensi SDM melalui pembinaan dan penguatan peran tim teknis memungkinkan pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan lebih baik. Di sisi lain, perencanaan yang berbasis target jangka menengah dan jangka panjang membuat program pembinaan lebih terarah, sehingga capaian tahun 2026 mampu berada di jalur yang konsisten menuju target tahun 2029 sebesar 78,25 poin.

• Faktor Penghambat Ketercapaian Target

Meskipun realisasi tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, capaian terhadap target akhir tahun 2029 baru mencapai 77,32 persen, yang menandakan masih adanya sejumlah faktor penghambat. Salah satu kendala utama adalah ketidakpastian anggaran maupun prioritas program di instansi sektor. Keterbatasan dan dinamika alokasi sumber daya sering kali memengaruhi kesinambungan kegiatan pembinaan dan implementasi rekomendasi statistik sektor di lapangan.

Selain itu, tingkat kesiapan dan kapasitas instansi sektor yang beragam juga menjadi tantangan. Tidak semua instansi memiliki SDM maupun komitmen yang sama dalam mendukung pembinaan statistik sektor. Perbedaan tingkat literasi statistik dan pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan hasil pembinaan belum sepenuhnya optimal dan memerlukan upaya pendampingan yang lebih intensif serta berkelanjutan.

Faktor penghambat lainnya adalah perbedaan regulasi internal, perubahan kebijakan, serta dinamika organisasi di instansi mitra dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Kondisi ini menuntut strategi pembinaan yang lebih adaptif, penguatan manajemen perubahan, serta pendekatan yang lebih fleksibel agar target jangka panjang tahun 2029 dapat tercapai secara optimal.

■ Indikator 2: Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)

• Faktor Pendorong Ketercapaian Target

Capaian Indikator Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) yang mencapai 100 persen pada tahun 2026 menunjukkan keberhasilan Direktorat SIS dalam memenuhi seluruh target modul layanan yang telah ditetapkan, sekaligus memenuhi target tahun 2025 dan berada pada jalur optimal menuju target tahun 2029. Salah satu faktor utama pendorong capaian ini adalah konsistensi pengembangan modul layanan yang dijalankan secara terencana. Pengembangan layanan pengumpulan data berbasis MODA (CAPI, CAWI, dan PAPI), dashboard pengumpulan data, hingga layanan analisis dan visualisasi data menunjukkan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh dalam siklus statistik.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh koordinasi yang kuat, baik secara internal maupun lintas unit kerja dan pemangku kepentingan. Integrasi antar layanan mulai dari manajemen

survei, desain survei, pemrosesan data (tabulasi dan editing), hingga analisis dan visualisasi membutuhkan sinergi yang solid antar tim pengembang, tim teknis, dan pengguna layanan. Mekanisme koordinasi yang efektif memungkinkan pengembangan modul dilakukan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan selaras dengan Sistem Statistik Nasional.

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan perencanaan yang matang menjadi faktor kunci lainnya. SDM dengan keahlian di bidang sistem informasi, statistik, *data science*, dan *artificial intelligence* mampu menerjemahkan kebutuhan statistik ke dalam solusi teknologi yang andal. Perencanaan pengembangan modul yang dilakukan secara bertahap dan berbasis target tahunan membuat setiap layanan SISNAS dapat dikembangkan secara fokus, terukur, dan berkesinambungan.

- **Faktor Penghambat Ketercapaian Target**
Meskipun capaian indikator telah mencapai 100 persen, dalam proses pengembangannya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menjadi penghambat dan perlu diantisipasi ke depan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian anggaran, terutama dalam menjaga keberlanjutan pengembangan dan pemeliharaan modul layanan. Pengembangan sistem yang mencakup layanan canggih seperti *artificial intelligence*, pemrosesan data skala besar, dan visualisasi interaktif membutuhkan dukungan pendanaan yang stabil untuk infrastruktur, lisensi, serta peningkatan kapasitas sistem.

Selain itu, dinamika prioritas organisasi dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang juga dapat memengaruhi konsistensi pengembangan SISNAS. Perubahan kebijakan, penambahan kebutuhan layanan baru, atau penyesuaian fokus program nasional berpotensi menggeser prioritas pengembangan modul yang telah direncanakan. Kondisi ini menuntut fleksibilitas tinggi dalam manajemen proyek, namun di sisi lain dapat memperpanjang waktu pengembangan atau meningkatkan kompleksitas integrasi antar layanan.

Faktor penghambat lainnya adalah tantangan teknis dan kesiapan pengguna. Integrasi berbagai layanan mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan visualisasi memerlukan kesiapan infrastruktur, kualitas data yang konsisten, serta kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem secara optimal. Perbedaan tingkat literasi digital dan statistik di kalangan pengguna berpotensi mengurangi pemanfaatan maksimal layanan SISNAS, sehingga diperlukan upaya pendampingan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar capaian 100 persen dapat dipertahankan dan memberikan dampak yang optimal.

■ Indikator 3: Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- **Faktor Pendorong Ketercapaian Target**
Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2026 sebesar 80,04 persen menunjukkan bahwa layanan TIK yang diberikan telah mampu memenuhi target jangka menengah tahun 2025 dan berada pada jalur yang positif menuju target tahun 2029. Salah satu faktor utama yang mendorong ketercapaian ini adalah penguatan digitalisasi layanan TIK yang dilakukan secara konsisten. Pemanfaatan sistem layanan berbasis aplikasi, mekanisme tiket layanan, serta penyediaan layanan yang semakin terstandar telah meningkatkan kemudahan akses, kecepatan respon, dan transparansi dalam penyelesaian permintaan pengguna.

Faktor pendorong lainnya adalah koordinasi yang kuat antara unit pengelola layanan TIK dengan unit kerja pengguna. Pola komunikasi yang terstruktur, baik melalui forum koordinasi, sosialisasi layanan, maupun mekanisme umpan balik, memungkinkan permasalahan teknis dan kebutuhan pengguna ditangani secara cepat dan tepat. Koordinasi ini juga mendukung penyelarasan ekspektasi pengguna dengan kapasitas layanan, sehingga meningkatkan persepsi positif terhadap kualitas layanan yang diterima.

Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas serta perencanaan layanan yang baik turut berkontribusi terhadap capaian indikator ini. Tim teknis yang kompeten dan responsif mampu menjaga stabilitas sistem serta memberikan solusi yang memadai atas gangguan maupun permintaan layanan. Perencanaan layanan TIK yang berbasis kebutuhan pengguna dan evaluasi berkala terhadap tingkat kepuasan menjadi landasan penting dalam menjaga mutu layanan dan memastikan target kinerja dapat dicapai secara berkelanjutan.

- **Faktor Penghambat Ketercapaian Target**
Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat peningkatan tingkat kepuasan layanan TIK menuju target jangka panjang tahun 2029. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian anggaran yang dapat memengaruhi keberlanjutan pengembangan dan peningkatan kualitas layanan. Keterbatasan anggaran berpotensi menunda pembaruan infrastruktur, peningkatan kapasitas sistem, maupun adopsi teknologi baru yang sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Faktor penghambat berikutnya adalah dinamika prioritas organisasi dan meningkatnya ekspektasi pengguna. Seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan TIK dalam proses bisnis, kebutuhan layanan menjadi semakin kompleks dan beragam. Perubahan prioritas program atau kebijakan dapat menyebabkan penyesuaian fokus layanan, sehingga tidak seluruh kebutuhan pengguna dapat dipenuhi secara optimal dalam waktu yang bersamaan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepuasan.

Selain itu, tantangan operasional dan keterbatasan kapasitas SDM juga dapat memengaruhi kualitas layanan. Beban kerja yang tinggi, peningkatan volume permintaan layanan, serta kebutuhan kompetensi baru di bidang teknologi terkini menuntut upaya penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Apabila tidak diimbangi dengan penambahan sumber daya atau peningkatan kompetensi, kondisi ini berpotensi menurunkan kecepatan respon dan kualitas layanan, sehingga menghambat peningkatan kepuasan pengguna secara signifikan.

3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

a. Prioritas Nasional

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun oleh Tim Pembina Statistik Sektoral Direktorat SIS, telah dilakukan kegiatan pembinaan sesuai dengan rencana kinerja yang sudah disusun. Berikut diuraikan output kegiatan pembinaan berikut kendala, solusi dan langkah tindak lanjut yang perlu diambil.

🏠 Kementerian Pertahanan

- **Output**
Realisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral di Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepanjang tahun 2025 telah berhasil dilakukan sebanyak 4 pertemuan dari rencana 5 pertemuan sesuai rencana kerja yang sudah disusun. Tabel berikut membandingkan rencana Pembinaan Statistik Sektoral di Kementerian Pertahanan yang disusun di awal tahun dengan hasil nyata yang telah dicapai selama periode 2025.

Tabel 3.5. Realisasi dan Capaian Pembinaan pada Kementerian Pertahanan

Rencana Kerja	Target Output	Realisasi/Capaian	Status (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Identifikasi Kegiatan Statistik dan Penjelasan Domain 1 (Prinsip SDI)	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 2 (Kualitas Data)	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 3 (Proses Bisnis Statistik)	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 4 (Kelembagaan)	Menjelaskan indikator pada Domain 4 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 4 dan 5 PSS ke dua produsen data	100%

- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Kurangnya realisasi kegiatan dibandingkan dengan target disebabkan oleh padatnya jadwal kegiatan pekerjaan utama baik dari tim Pembina maupun tim Walidata pada Kemhan sehingga sulit untuk menyesuaikan jadwal pertemuan. Oleh sebab itu, tim PSS Kemhan berinisiatif untuk memadatkan penyampaian materi pada pertemuan pembinaan sehingga semua materi dapat tersampaikan pada pertemuan yang berhasil dilaksanakan. Pembahasan difokuskan pada indikator-indikator EPSS Kemhan dengan nilai yang rendah. Diperlukan perencanaan yang lebih matang serta monitoring dan konfirmasi secara berkala agar realisasi ke depannya dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun kegiatan.

📍 BASARNAS

- Output
Realisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) telah dilakukan setidaknya sebanyak 6 (enam) kali secara daring atau online dan berfokus pelaksanaannya mulai bulan November tahun 2025. Tabel berikut membandingkan rencana Pembinaan Statistik Sektoral di BASARNAS yang disusun di awal tahun dengan hasil nyata yang telah dicapai selama periode 2025.

Tabel 3.6. Realisasi dan Capaian Pembinaan pada BASARNAS

Rencana Kerja	Target Output	Realisasi/Capaian	Status (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Identifikasi Kegiatan Statistik dan Penjelasan Domain 1 (Prinsip SDI)	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 2 (Kualitas Data)	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 3 (Proses Bisnis Statistik)	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	100%

Penjelasan Domain 4 (Kelembagaan)	Menjelaskan indikator pada Domain 4 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 4 dan 5 PSS ke dua produsen data	100%
-----------------------------------	--	--	------

- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Kendala kurangnya realisasi kegiatan dari target disebabkan oleh padatnya kegiatan internal pada BASARNAS, dan penugasan statistik sektoral yang diserahkan pada tim beranggotakan CPNS yang sedang melakukan Diklat. Namun secara umum, seluruh materi pembinaan telah tersampaikan sesuai rencana.

🏠 BSSN

- Output

Realisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah dilakukan setidaknya sebanyak 4 (empat) kali baik secara daring atau luring dan berfokus pelaksanaannya mulai bulan September sampai Desember tahun 2025. Tabel berikut membandingkan rencana Pembinaan Statistik Sektoral di BSSN yang disusun di awal tahun dengan hasil nyata yang telah dicapai selama periode 2025.

Tabel 3.7. Realisasi dan Capaian Pembinaan pada BSSN

Rencana Kerja	Target Output	Realisasi/Capaian	Status (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Identifikasi Kegiatan Statistik dan Penjelasan Domain 1 (Prinsip SDI)	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 2 (Kualitas Data)	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 3 (Proses Bisnis Statistik)	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	100%

- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Hal ini dikarenakan BSSN masih menunggu arahan pimpinan terkait pembinaan statistik sektoral dari BPS sejak bulan Juli 2025. BSSN saat itu masih memiliki keraguan tentang dasar hukum pembinaan statistik sektoral. Sebagian materi pembinaan telah tersampaikan, mulai dari identifikasi kegiatan, prinsip SDI, kualitas data, hingga proses bisnis statistik.

🏠 BIN

- Output

Realisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral di Badan Intelijen Negara (BIN) telah dilakukan setidaknya sebanyak 4 (empat) kali secara luring dengan mengunjungi BIN sepanjang tahun 2025. Tabel berikut membandingkan rencana Pembinaan Statistik Sektoral di BIN yang disusun di awal tahun dengan hasil nyata yang telah dicapai selama periode 2025.

Tabel 3.8. Realisasi dan Capaian Pembinaan pada BIN

Rencana Kerja	Target Output	Realisasi/Capaian	Status (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Identifikasi Kegiatan Statistik dan Penjelasan Domain 1 (Prinsip SDI)	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 2 (Kualitas Data)	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 3 (Proses Bisnis Statistik)	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 4 (Kelembagaan)	Menjelaskan indikator pada Domain 4 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 4 dan 5 PSS ke dua produsen data	100%

- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan PSS di BIN di antaranya adalah pemahaman walidata dan produsen data di BIN yang masih kurang mengenai dokumentasi kegiatan statistik yang perlu disiapkan dan kerahasiaan data dan informasi organisasi BIN. Namun demikian, tim PSS telah menyampaikan seluruh materi pembinaan dan melakukan diskusi awal dengan kedua tim produsen data untuk kegiatan statistik yang menjadi objek lokus penilaian EPSS pada periode berikutnya.

🏠 Bawaslu

- Output
Realisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah dilakukan setidaknya sebanyak 6 (enam) kali baik secara daring maupun luring. Tabel berikut membandingkan rencana Pembinaan Statistik Sektoral di BAWASLU yang disusun di awal tahun dengan hasil nyata yang telah dicapai selama periode 2025.

Tabel 3.9. Realisasi dan Capaian Pembinaan pada Bawaslu

Rencana Kerja	Target Output	Realisasi/Capaian	Status (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Identifikasi Kegiatan Statistik dan Penjelasan Domain 1 (Prinsip SDI)	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 2 (Kualitas Data)	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 2 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 3 (Proses Bisnis Statistik)	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 3 PSS ke dua produsen data	100%
Penjelasan Domain 4 (Kelembagaan)	Menjelaskan indikator pada Domain 4 PSS ke dua produsen data	Menjelaskan indikator pada Domain 4 dan 5 PSS ke dua produsen data	100%

- **Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut**
Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan PSS di BAWASLU adalah identifikasi kegiatan statistik yang menjadi lokus penilaian EPSS dan pembinaan PSS. Kegiatan penilaian EPSS dilakukan dengan periode waktu 2 tahun sekali sedangkan kegiatan organisasi BAWASLU dilakukan dengan periode 5 tahun sekali menyesuaikan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia. Nilai IPS BAWASLU pada penilaian EPSS periode sebelumnya (2024) sudah bernilai baik, sehingga sesuai aturan yang berlaku, perlu adanya pergantian kegiatan statistik yang menjadi objek lokus penilaian EPSS dan pembinaan PSS untuk periode berikutnya. Hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) untuk memastikan apakah lokus kegiatan EPSS BAWASLU bisa tetap menggunakan kegiatan sebelumnya. Hampir seluruh materi pembinaan sudah tersampaikan kepada peserta pembinaan di Bawaslu.

🏠 Ombudsman RI

- **Output**
Realisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral di Ombudsman Republik Indonesia telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali baik secara daring. Materi pembinaan yang disampaikan baru pada tahap pengenalan EPSS dan cara identifikasi kegiatan statistik serta prinsip SDI. Tabel berikut membandingkan rencana Pembinaan Statistik Sektoral di Ombudsman yang disusun di awal tahun dengan hasil nyata yang telah dicapai selama periode 2025.

Tabel 3.10. Realisasi dan Capaian Pembinaan pada Ombudsman RI

Rencana Kerja	Target Output	Realisasi/Capaian	Status (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Identifikasi Kegiatan Statistik dan Penjelasan Domain 1 (Prinsip SDI)	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	Mengidentifikasi kegiatan statistik dan menjelaskan Domain 1 PSS ke dua produsen data	100%

- **Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut**
Ombudsman hanya memiliki sedikit pegawai sehingga alokasi untuk penanggungjawab statistik sektoral diberikan kepada 2 (dua) pegawai saja dan bukan tim tersendiri. Tumpang tindih tugas pegawai juga menghambat fokus pimpinan Ombudsman terhadap pelaksanaan pembinaan.

2. Penyusunan Publikasi/Laporan Inflasi

- **Output**
Dukungan Direktorat SIS dalam penyediaan publikasi/laporan inflasi di antaranya adalah memberikan dukungan sistem pengumpulan data multimoda dalam penyelenggaraan survei terkait inflasi melalui aplikasi FASIH dan IPAS. Penyelenggaraan survei-survei tersebut dikoordinatori oleh Direktorat Statistik Harga. Pengembangan aplikasi untuk kebutuhan Direktorat Statistik Harga, meliputi: SHPB, SHPM, SHKK, SHK, SVEB, dan SHP.

Capaian realisasi kegiatan pengembangan aplikasi Statistik Harga telah mencapai 100% sesuai dengan IKU Terwujudnya SISNAS. Aktivitas yang dilakukan mencakup:

- Pembahasan hasil perhitungan indeks dari sistem SHPB.
 - Pembangunan aplikasi dan *briefing* Innas SHPM.
 - Rilis aplikasi rekon data harga SHKK Provinsi dan Nasional.
 - *Maintenance* survei-survei di HK melalui aplikasi SHK.
 - *Monitoring surveillance* SVPEB melalui aplikasi SVEB
 - *Troubleshooting* permasalahan entry data aplikasi SHP, dst.
- **Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut**

Kendala yang dihadapi dalam penyediaan dukungan aplikasi FASIH untuk mengumpulkan data dalam aspek prioritas adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam manajemen survei. Solusinya adalah dengan melakukan manajemen waktu penyelesaian tugas dengan SDM yang ada. Selain itu, pada pengoperasian FASIH juga terdapat kendala pada saat ekspor data, ketidaksesuaian antara FASIH-SM dan FASIH-Dashboard, dan permintaan perpanjangan periode survei dari PJK. Hal tersebut berhasil diatasi melalui diskusi dengan PJK dan melakukan troubleshooting pada kode aplikasi. Pada operasional aplikasi IPAS untuk pengolahan data yang telah dikumpulkan, terdapat kendala server internal yang bermasalah. Solusinya adalah melakukan setting untuk memperbaiki kinerja server.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan dan peningkatan kualitas SDM sehingga SDM yang ada dapat mengelola aplikasi yang menjadi pendukung dalam pencapaian prioritas nasional, serta perencanaan yang lebih baik di awal tahun kegiatan. Selanjutnya dapat dibuat pedoman atau dokumentasi setting server aplikasi pendukung sehingga pegawai berikutnya yang melakukan setting dapat mengikuti petunjuk yang ada.

3. Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi

- Output

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi pada tahun 2025, Direktorat SIS telah berperan aktif dalam menyediakan platform serta melaksanakan pemrosesan data berskala besar yang diperlukan untuk mendukung pengolahan Mobile Positioning Data (MPD). Dukungan ini mencakup penyediaan infrastruktur komputasi, pengelolaan penyimpanan data, serta pengembangan dan optimalisasi sistem pemrosesan big data yang andal dan efisien. Melalui dukungan tersebut, Direktorat SIS memastikan bahwa proses pengolahan data dapat dilakukan secara tepat waktu, aman, dan sesuai dengan kebutuhan unit teknis penghasil statistik.

Pemanfaatan platform dan kapabilitas pemrosesan big data yang disediakan oleh Direktorat SIS telah mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan statistik prioritas, khususnya dalam penghitungan statistik pariwisata seperti Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Nasional (Wisnas), statistik mobilitas penduduk seperti commuter, serta analisis statistik ekonomi-sosial melalui identifikasi wilayah metropolitan (Metropolitan Statistical Area—MSA). Dukungan ini memungkinkan pemanfaatan sumber data alternatif berbasis big data secara lebih optimal untuk menghasilkan statistik yang lebih akurat, relevan, dan tepat waktu.

Melalui penyediaan platform dan layanan pemrosesan big data tersebut, Direktorat SIS turut berkontribusi dalam mendukung implementasi Proyek Prioritas Nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola data serta pengembangan dan pemanfaatan emerging technology untuk statistik resmi. Capaian ini menunjukkan komitmen Direktorat SIS dalam memperkuat fondasi teknologi informasi yang mendukung transformasi digital statistik nasional, serta meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan big data sebagai sumber data strategis untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan big data sebagai statistik resmi seperti:

- Kapasitas dan kinerja infrastruktur big data yang terbatas. Volume *Mobile Positioning Data* (MPD) yang sangat besar membutuhkan kapasitas komputasi, penyimpanan, dan pemrosesan yang tinggi. Pada periode awal implementasi, terdapat keterbatasan sumber daya infrastruktur yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan data.
- Kompleksitas pengelolaan dan pemrosesan data big data.

Data MPD memiliki karakteristik volume, *velocity*, dan *variety* yang tinggi, sehingga memerlukan metode dan *tools* khusus untuk proses ingestion, cleansing, transformasi, dan analisis agar dapat digunakan sebagai statistik resmi.

- Keterbatasan tools dan otomasi proses pengolahan data.
Sebagian proses pemrosesan masih memerlukan intervensi manual atau belum sepenuhnya terotomasi, sehingga berpotensi mempengaruhi efisiensi dan konsistensi proses pengolahan data.
- Kebutuhan penguatan tata kelola dan keamanan data.
Mengingat data yang digunakan bersifat sensitif, diperlukan penguatan aspek keamanan, pengendalian akses, serta tata kelola data untuk memastikan perlindungan data dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

Untuk kendala tersebut telah dilakukan beberapa alternatif solusi, meliputi:

- Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang tersedia.
Direktorat SIS telah melakukan optimalisasi konfigurasi dan pemanfaatan infrastruktur komputasi dan penyimpanan untuk meningkatkan kinerja pemrosesan big data.
- Pengembangan dan penyempurnaan platform pemrosesan big data.
Dilakukan pengembangan dan penyempurnaan platform pemrosesan data, termasuk peningkatan stabilitas sistem, penguatan manajemen data, serta peningkatan efisiensi proses pengolahan.
- Peningkatan koordinasi dengan unit teknis terkait.
Direktorat SIS secara aktif melakukan koordinasi dengan unit teknis penghasil statistik untuk memastikan kebutuhan pemrosesan data dapat dipenuhi secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan analisis statistik.
- Penguatan pengelolaan akses dan keamanan data.
Dilakukan pengaturan akses pengguna serta penerapan mekanisme pengamanan sistem untuk memastikan data dikelola secara aman dan sesuai dengan prinsip tata kelola data yang baik.

Adapun rencana tindak lanjut, meliputi:

- Penguatan kapasitas infrastruktur big data.
Melakukan peningkatan kapasitas komputasi dan penyimpanan secara bertahap untuk mendukung kebutuhan pemrosesan big data yang terus meningkat.
- Pengembangan otomasi proses pemrosesan data.
Mengembangkan pipeline pemrosesan data yang lebih terotomasi untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kecepatan pengolahan data.
- Peningkatan kapabilitas platform big data.
Melakukan pengembangan berkelanjutan terhadap platform big data agar lebih andal, scalable, dan mampu mendukung berbagai kebutuhan statistik berbasis big data.
- Penguatan tata kelola dan keamanan data.
Melanjutkan penguatan tata kelola data, termasuk pengaturan akses, monitoring penggunaan sistem, serta penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan dan perlindungan data.
- Dukungan terhadap pengembangan statistik berbasis big data lainnya.
Platform yang telah dikembangkan akan terus dimanfaatkan dan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan statistik resmi berbasis big data pada kegiatan lainnya sesuai dengan roadmap pemanfaatan big data BPS.

b. Prioritas Presiden

1. Inpres 4 2025: DTSEN

🏠 Output

- Penyusunan Awal DTSEN

- Melakukan integrasi data 3 (tiga) sumber data DTSEN yaitu data Regsosek dari Bappenas,
- Melakukan sinkronisasi DTSEN awal dengan data kependudukan Dukcapil.
- Pengelolaan DTSEN
 - Melakukan verifikasi, validasi dan eksplorasi data dari penyedia sumber data saat proses penerimaan data.
 - Melakukan pemadanan sumber data ke dalam DTSEN.
 - Melakukan teknis pembaruan database DTSEN berdasarkan hasil pemadanan data.
 - Melakukan sinkronisasi DTSEN dengan data kependudukan Dukcapil.
 - Melakukan snapshot DTSEN sesuai periode snapshot atau jika ada kebutuhan.
 - Mengimplementasikan model pemeringkatan yang telah disusun oleh Politeknik Statistika (STIS).
- Penyampaian DTSEN

Peran Direktorat SIS dalam penyampaian DTSEN dalam rangka pemanfaatan, pengawasan maupun data balikan adalah menyiapkan snapshot DTSEN pada periode penyampaian serta menyediakan akses DTSEN bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sudah disepakati sebelumnya melalui pembahasan baik *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dukungan penuh juga diberikan oleh Direktorat SIS dalam proses penyusunan regulasi dan tata kelola untuk mendukung DTSEN, diantaranya adalah Peraturan Kepala BPS No 28 Tahun 2025 dan Peraturan Badan tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN No 6 Tahun 2025.

📦 Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Pada pengembangan Platform DTSEN terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Tim Teknis, di antaranya adalah proses perpanjangan lisensi Supermap yang sempat tertunda karena masih menunggu clearance. Hal ini diatasi dengan percepatan proses clearance sehingga perpanjangan lisensi dapat segera terealisasi. Tindak lanjutnya adalah dengan perencanaan kebutuhan perlu diidentifikasi dan disampaikan lebih awal.

Selain itu pada aktivitas pemenuhan layanan data terkait DTSEN terdapat beberapa kendala, di antaranya menunggu rule perbaikan anomali dari PJK dan belum adanya kebutuhan dashboard DTSEN dari PJK. Aktivitas penerimaan data dari beberapa K/L juga terkendala seperti tidak adanya follow up lanjutan, data belum diterima, dan belum adanya koordinasi dari K/L terkait. Kendala-kendala tersebut diselesaikan dengan menghubungi pihak-pihak terkait dan memperoleh kejelasan informasi. Sebagai langkah tindak lanjut dibutuhkan penyusunan SOP dan secara terus-menerus dilakukan evaluasi sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan semakin lancar.

2. Inpres 6 2025: Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

- Output

Pelaksanaan Survei KSA Padi sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2025 telah selesai dilakukan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota dengan metode pengumpulan data berbasis survei (sampling) menggunakan CAPI. Capaian realisasi implementasi dukungan CAPI sebesar 100% dengan jumlah titik amatan sebanyak 281.817 titik dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Di sisi lain, pada Survei Ubinan Padi telah dilakukan pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan yang dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS.
- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Kendala yang dialami selama pelaksanaan di antaranya adalah volume data yang cukup besar. Kendala tersebut dapat diatasi dengan mengurangi resolusi dari file yang akan diproses. Selain itu terdapat issue koneksi internet dengan provider yang lambat di BPS Daerah. Sebagai langkah tindak lanjut yang dapat diambil, perlu disepakati ketentuan

besaran data yang akan diproses dan didokumentasikan dalam pedoman. Selain itu juga dengan peningkatan infrastruktur TI pendukung yang digunakan dalam pemrosesan data.

3. Inpres 8 2025: Kemiskinan Ekstrem

- Output

Kegiatan SUSENAS tahun 2025 dilakukan pada bulan Maret dan September sebagaimana dijadwalkan oleh PJK setiap tahunnya dengan responden ruamh tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dukungan Direktorat SIS terhadap penyediaan data Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui penyelenggaraan survei SUSENAS dengan bantuan aplikasi berbasis desktop. Capaian realisasi pengembangan aplikasi SUSENAS telah mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun kegiatan. Selain pengembangan aplikasi, aktivitas lainnya yang dilakukan oleh tim pengembang adalah maintenance dan troubleshooting atas permasalahan/error yang ditemukan selama operasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional aplikasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai.

Dukungan lainnya yang diberikan oleh Direktorat SIS, antara lain sebagai berikut:

- Penyediaan aplikasi SOBAT untuk rekrutmen petugas lapangan dan pengolahan survei.
 - Penyediaan aplikasi pengolahan pemutakhiran serta pencacahan lengkap survei.
 - Aplikasi monitoring yang digunakan untuk pengawasan kegiatan pelaksanaan serta pengolahan data survei.
 - Penyediaan aplikasi penjaminan kualitas kegiatan statistik untuk meningkatkan data yang berkualitas dan dapat diandalkan.
 - Proses kompilasi data final seluruh provinsi untuk disampaikan ke pihak Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
- Kendala yang dihadapi pada pembangunan aplikasi SUSENAS adalah perubahan kuesioner dan perubahan rule validasi. Kendala ini dapat diatasi dengan melakukan penyesuaian pada aplikasi namun membutuhkan tambahan waktu untuk penyelesaiannya. Sebagai rencana tindak lanjut untuk bahan evaluasi, pada kegiatan berikutnya diharapkan perencanaan dan identifikasi kebutuhan dari PJK dapat dibuat dengan lebih matang agar penyediaan dukungan TIK dapat dilakukan secara efisien.

Di samping itu, pada operasional aplikasi SOBAT ditemukan kendala berupa data mitra yang diberikan oleh BPS Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan template dan masih terdapat proses bisnis yang perlu didiskusikan dengan Tim Biro Perencanaan terkait perekrutan mitra kegiatan. Hal ini tentunya membutuhkan waktu dalam penyelesaian, namun tim pengembang aplikasi SOBAT berhasil mengatasi kendala tersebut hingga selesai. Langkah tindak lanjut yang dapat diambil adalah mensosialisasikan template yang digunakan sebagai standar kepada seluruh satuan kerja pengguna aplikasi SOBAT dan memberikan warning pada aplikasi agar pengguna dapat menyesuaikan file menggunakan template yang disediakan.

4. Makanan Bergizi Gratis

- Output

Peran Direktorat SIS dalam penyelenggaraan Survei Dampak MBG adalah dengan penyediaan fasilitas pencacahan melalui aplikasi FASIH. Proses pembangunan aplikasi dimulai dengan tahap pembahasan rencana survei dan moda pendataan yang akan digunakan. Survei yang diselenggarakan terdiri dari 2 macam survei yaitu Survei Baseline dan Survei Khusus. Moda pendataan yang ditetapkan untuk digunakan adalah CAPI dengan jumlah kuesioner sebanyak 4 kuesioner.

Capaian realisasi dukungan FASIH untuk Survei Dampak MBG sebesar 100% dari rencana yang telah ditetapkan. Survei selesai dilakukan di 38 provinsi dengan jumlah periode survei dilakukan sebanyak 2 kali periode untuk setiap survei. Survei Khusus berhasil dilaksanakan

pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Dukungan TI Direktorat SIS diberikan melalui penyediaan platform dan infrastruktur TI untuk menunjang seluruh tahapan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- Aplikasi FASIH untuk pengumpulan data pemutakhiran, penarikan sampel, dan pencacahan lengkap di lapangan.
 - Aplikasi SOBAT untuk rekrutmen petugas survei.
 - Dashboard monitoring berbasis web untuk memantau pengumpulan data dan mendeteksi anomali data.
 - Aplikasi IPAS untuk mendukung penyajian tabulasi serta analisis data
 - Dukungan terhadap serangkaian aksi penjaminan terhadap produk kegiatan ini berupa penyediaan aplikasi penjaminan kualitas kegiatan statistik yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas data.
- **Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut**
 Pada penyediaan dukungan FASIH untuk Survei Dampak MBG, terdapat kendala belum finalnya kuesioner, belum ada rule validasi, perlu pembahasan khusus terkait teknis kegiatan, sementara deadline penyelesaian ditargetkan pada bulan Juni. Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan koordinasi yang intens dengan PJK. Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah menyepakati jadwal kegiatan hingga rilis data menyesuaikan dengan sumber daya kegiatan yang tersedia sehingga kendala serupa seperti kuesioner yang belum final dapat dihindari.

c. Isu Strategis Nasional

1. Perpres 12 2025: Survei Kesejahteraan Petani

- **Output**
 BPS menyelenggarakan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN sebagai salah satu Isu Strategis Nasional yang harus dihadapi. Dukungan yang diberikan oleh Direktorat SIS di antaranya berupa penyiapan aplikasi FASIH dengan moda CAPI untuk memfasilitasi petugas dalam melakukan pencacahan, serta aplikasi SOBAT dalam perekrutan mitra pencacahan. Survei Kesejahteraan Petani (SKP) telah selesai dilaksanakan dengan cakupan meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota pada 6 subsektor pertanian oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan.

Aplikasi pendukung SKP dikembangkan oleh Direktorat SIS pada tahun 2025 dengan waktu pengembangan sekitar 1,5 bulan dan layanan pengembangan sistem dengan SLA selama 3 bulan, seiring dengan finalisasi kuesioner yang diterima pada akhir Juli 2025. Sistem mulai digunakan pada pertengahan September 2025 dan diluncurkan secara internal pada tanggal 14 September 2025. Evaluasi awal telah dilakukan melalui pengumpulan masukan dari unit teknis terkait untuk perbaikan pada pelaksanaan survei berikutnya. Tahap pengembangan yang dilakukan di antaranya meliputi:

- Pembangunan aplikasi CAPI.
 - Pembangunan dashboard.
 - Penyusunan buku pedoman.
 - Workshop Intama.
 - Pelatihan Innas.
 - Pelatihan Petugas.
- **Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut**
 Sepanjang pelaksanaan dukungan aplikasi FASIH untuk pelaksanaan SKP tidak ditemukan kendala yang berarti, hal ini menandakan bahwa proses pengembangan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang matang. Sebagai tindak lanjutnya, tim pengembang dapat

melakukan dokumentasi kegiatan untuk menjadi basis pengetahuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya agar dapat dilakukan sesuai dengan kegiatan SKP.

Pada penyiapan dukungan dengan aplikasi SOBAT, terdapat beberapa kendala di antaranya masih kurangnya SDM pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasi SOBAT versi 2 karena masih perlu monitoring dan maintenance aplikasi versi 1. Selain itu, juga terdapat kendala adanya perubahan jadwal dari PJK yang belum semua pemangku kepentingan ter-update atas info tersebut. Hal-hal tersebut dapat diatasi dengan manajemen waktu dan pembagian tugas dalam tim, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PJK untuk senantiasa mengupdate info jadwal kegiatan. Kendala ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penambahan SDM dan melakukan knowledge sharing, serta membuat jalur komunikasi yang lebih efektif untuk menjamin kelangsungan hingga kegiatan selesai diselenggarakan.

2. UU 16 1997: Sensus Ekonomi

- Output

Sesuai dengan perencanaan kegiatan Sensus Ekonomi yang sudah disusun sebagai amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada kegiatan Gladi Bersih SE2026, dukungan TIK dari Direktorat SIS dilaksanakan mengikuti perencanaan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Dukungan dalam pembentukan *prelist* SE 2026 bersama-sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS);
 - FRS (MFD *online*) untuk menjalankan proses pemutakhiran kerangka wilayah melalui mekanisme yang terstruktur dan bersiklus;
 - FASIH merupakan salah satu dukungan inti dari Direktorat SIS dalam hal pengumpulan data SE 2026, mulai dari pendesainan kuesioner, pengumpulan data *multiplatform*, dashboard pendataan dan anomali, hingga pemanfaatan Gen AI dalam hal penentuan KBLI usaha;
 - SOBAT merupakan aplikasi pengelolaan mitra statistik dalam berbagai kegiatan sensus/survei yang mendukung pengelolaan mitra yang terintegrasi, guna menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel. SOBAT berperan strategis pada tahapan rekrutmen, penetapan, dan penugasan petugas, yaitu sebelum proses pengumpulan data;
 - *Integrated Processing and Analysis System* (IPAS) merupakan platform terpadu untuk pemrosesan dan analisis data. Dalam pelaksanaan Gladi Bersih Sensus Ekonomi 2026, IPAS digunakan sebagai salah satu komponen dukungan teknologi informasi untuk mengolah data hasil pendataan;
 - Maritemen merupakan aplikasi yang menyediakan kapabilitas layanan secara sistematis dalam menjalankan dan mengelola rangkaian kegiatan manajemen risiko. Maritemen digunakan untuk mengelola risiko pada pelaksanaan gladi bersih SE 2026 dan juga kegiatan SE 2026 nantinya;
 - Pengujian aplikasi memiliki tugas dan fungsi secara umum untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa aplikasi atau produk perangkat lunak yang dikembangkan secara *in-house* oleh tim developer BPS baik di Pusat, Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota berfungsi dengan benar, aman dan efisien sesuai dengan persyaratan spesifiknya. Pengujian dilakukan untuk aplikasi-aplikasi pendukung SE 2026.
- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
- Pada penyediaan dukungan FASIH untuk Gladi Bersih SE2026, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya adalah:
- Penambahan rincian pertanyaan untuk pengecekan oleh PML.
 - Hasil feedback uji coba perlu konfirmasi.
 - Ditemukan adanya NIK ganda pada *prelist*.
 - Penambahan pertanyaan kunjungan untuk kartu kendali.

Selain permasalahan di atas, terdapat juga kendala besar yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan GB SE2026, yaitu prelist UMKM perlu dicopy ke SLS CAPI di mana jumlah record yang perlu dimasukkan ada yang mencapai 8.000 baris dalam 1 SLS sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan operasional lapangan. Namun demikian, berkat kerja keras tim pengolahan SE2026, kendala tersebut berhasil ditangani bersama. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan uji coba dan pengecekan kebutuhan pendataan melalui diskusi dengan PJK

3. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

- Output

Pada pengembangan platform PASTI (*Platform for Analytical System and Trend Intelligence*), output hasil pengembangan platform terdiri dari beberapa modul, di antaranya:

- Modul Manajemen Akses
- Modul Manajemen Indikator
- Modul Manajemen Proyek
- Modul Manajemen Kerangka Kerja
- Modul Pengecekan Koherensi
- Modul Rekonsiliasi
- Modul Sumber Data dan Fenomena
- Modul Utilitas
- Modul Dashboard, serta
- Modul Diskusi

- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa kendala yang dihadapi selama pengembangan platform antara lain perubahan proses bisnis, perubahan template dan perubahan kebutuhan dari PJK. Walaupun kendala yang dialami oleh tim pengembang platform PASTI tersebut cukup mengganggu proses pengembangan, namun tim telah berhasil mengatasinya sehingga platform selesai melalui tahap pengembangan dan direncanakan akan dirilis untuk memulai fase operasional. Sebagai langkah tindak lanjut, perlu adanya koordinasi dan perencanaan yang lebih matang antara PJK dengan tim pengembang platform PASTI agar kendala tersebut tidak terulang kembali pada tahap pengembangan selanjutnya.

4. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025: Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

- Output

Dalam penyusunan Neraca Komoditas untuk data komoditas pangan strategis, Direktorat SIS memberikan dukungan operasional platform PASTI (*Platform for Analytical System and Trend Intelligence*) untuk menyajikan hasil penyusunan neraca dan aplikasi SADEWA untuk melakukan penjaminan kualitas. Terdapat 2 modul yang dikembangkan pada aplikasi SADEWA yaitu Modul QG dan Modul QAF.

- Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi pada pengembangan aplikasi SADEWA yaitu perlunya koordinasi dengan beberapa sistem seperti HARMONIS (untuk integrasi dengan SSO pegawai), MARITEMEN, dan FASIH. Kendala koordinasi ini disebabkan oleh padatnya jadwal tim pengembang aplikasi-aplikasi tersebut sehingga perlu mengatur waktu pertemuan untuk disepakati. Tindak lanjut penyelesaian dari kendala ini dilakukan evaluasi untuk perencanaan pada kegiatan pengembangan sistem berikutnya untuk diidentifikasi kebutuhan dan disusun timeline kegiatan sehingga tahap pengembangan dapat berjalan dengan lancar.

Selain dari output berupa dukungan-dukungan yang telah disebutkan di atas, keseluruhan kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional yang turut dilakukan oleh BPS tidak akan dapat terselenggara tanpa adanya dukungan infrastruktur TIK termasuk hardware dan software

yang digunakan oleh seluruh pegawai BPS baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Untuk menyediakan, mengelola, dan memperbaiki perangkat-perangkat tersebut jika terjadi kerusakan, Direktorat SIS mengelola Layanan TIK yang juga menjadi salah satu IKU yaitu Terwujudnya Layanan TIK yang Prima.

Di samping itu, dukungan operasional TIK tidak terlepas dari tersedianya infrastruktur jaringan intra dan pusat data BPS yang telah disediakan oleh Direktorat SIS. Seluruh aplikasi yang digunakan oleh pegawai dalam kegiatan-kegiatan penyediaan data statistik, beroperasi di atas infrastruktur TIK tersebut. Sebelum dirilis, seluruh aplikasi juga telah melalui tahap uji coba dengan standar keamanan TIK yang telah ditetapkan oleh Direktorat SIS dan mengacu pada standar-standar yang berlaku di pemerintahan. Seluruh aplikasi, infrastruktur dan keamanan TIK juga telah melalui proses audit TIK yang diselenggarakan oleh Inspektorat III yang bekerja sama dengan Direktorat SIS sebagai Tim Auditor TIK.

Penyediaan dukungan TIK ini tidak terlepas dari munculnya kendala-kendala yang dialami selama pembangunan dan operasional. Kendala tersebut berhasil diatasi dengan penyediaan anggaran kebutuhan TIK dan koordinasi berbagai pihak pemangku kepentingan terkait hingga operasional tetap dapat dilaksanakan. Hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan evaluasi dan memenuhi rekomendasi aktivitas sebagai tindak lanjut dari temuan audit TIK yang telah diselenggarakan. Dengan demikian diharapkan penyediaan dukungan TIK untuk kegiatan statistik dan administrasi organisasi di BPS dapat semakin ditingkatkan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik.

3.4. Prestasi dan Inovasi Direktorat Sistem Informasi Statistik

a. Prestasi

1. BPS berhasil mendapatkan sertifikasi *Surveillance* ISO 27001:2022 ke 2 dengan cakupan fasilitas DC DRC, *API Webservices*.
2. Pusat Data Center BPS telah mendapatkan sertifikasi desain Pusat Data (TCCD) *Tier 3* untuk menunjukkan komitmen BPS terhadap standar kelas Pusat Data Dunia serta menjamin keandalan, ketersediaan, dan redundansi layanan Pusat Data BPS.
3. Penetapan FASIH BPS sebagai kategori Infrastruktur Informasi Vital (IIV) pada sektor pemerintahan
4. Inspektorat BPS dan Tim Strategi telah melakukan Audit keamanan internal terhadap aplikasi FASIH BPS.
5. Peringkat 2 implementasi AKIP Tahun 2025 kategori Unit Kerja Badan Pusat Statistik.
6. BPS telah mengupdate pedoman implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001: 2022 dalam rangka *Surveillance* #2.
7. Direktorat SIS mendukung komponen penilaian pada unsur metode dan pelaksanaan sehingga pusat penilaian kompetensi Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pusat Statistik Terakreditasi A.

b. Inovasi

Tabel 3.11. Inovasi Direktorat Sistem Informasi Statistik

No	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat
(1)	(2)	(3)
1	Integrasi pengelola risiko dan pengukuran kinerja triwulanan	Inovasi ini memungkinkan identifikasi risiko strategis dan operasional dilakukan secara simultan dengan evaluasi capaian kinerja

2	<i>SIS Traffic Light</i>	Inovasi ini dimanfaatkan pimpinan sebagai alat monitoring mingguan untuk memastikan pengadaan TI berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan infrastruktur TI di lingkungan SIS.
3	<i>Dashboard Monitoring Pengadaan Infrastruktur TI</i>	Menyediakan registrasi serta pemantauan risiko TI secara terintegrasi dari seluruh aktivitas dan tim kerja di lingkungan DSIS
4	<i>Dashboard pengelolaan risiko TI</i>	Menyediakan registrasi serta pemantauan risiko TI secara terintegrasi dari seluruh aktivitas dan tim kerja di lingkungan DSIS
5	SINERGI	Efisiensi proses bisnis dengan melakukan integrasi SIMONEV, AKIP, KIPAPP, dan aplikasi back-office
6	KipApp	Inovasi ini memungkinkan aktivitas pegawai terdokumentasi secara rutin dan otomatis
7	Web Counselling Center BPS	Menyediakan akses konseling yang mudah, aman, dan rahasia bagi pegawai
8	Dashboard dan tata kelola lembur	Pengelolaan lembur secara terintegrasi dan transparan
9	Summarization Ticket FASIH	Mengelola laporan atau tiket pengguna dari petugas aplikasi FASIH secara otomatis
10	Analisis Data Feedback Pariwisata	Mengolah umpan balik responden survei wisatawan berbentuk teks terbuka agar dapat dianalisis secara terstruktur dan sistematis
11	Platform DevsecOps	Mendukung pengembangan sistem aplikasi yang aman dan andal melalui integrasi praktik <i>development</i> , <i>security</i> , dan <i>operations</i> dalam satu alur kerja terpadu
12	Virtualisasi Server	Mendukung layanan hosting sistem aplikasi secara terpusat dan efisien
13	Sistem Monitoring Fasilitas Pendukung Pusat Data	Mendukung pemantauan perangkat dan fasilitas pendukung Pusat Data secara terintegrasi dan berkelanjutan
14	Sistem Monitoring Infrastruktur TI	Mendukung pemantauan layanan dan kinerja perangkat infrastruktur TI secara terintegrasi dan berkelanjutan
15	Sistem Monitoring Keamanan Informasi	Memantau keamanan akses dan lalu lintas data/informasi yang masuk dan keluar dari Pusat Data
16	Sistem Monitoring Aset Perangkat Infrastruktur TI	Mendukung pengelolaan dan pengendalian konfigurasi aset perangkat infrastruktur TI Pusat Data secara terintegrasi
17	Sistem Monitoring Koneksi Jaringan	Mendukung pemantauan lalu lintas koneksi jaringan dan kinerja perangkat jaringan secara terintegrasi dan berkelanjutan

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Tabel 3.13. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
Sasaran 1. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik								
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik	Poin	59,26	60,50	102,10	0	0	0	>=1 (Efisien)
Sasaran 2. Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional								
Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)	Persen	100	100	100	426.213.000	229.113.346	53,76	1,86 (Efisien)
Sasaran 3. Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima								
Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	80	80,04	100,05	314.296.020.000	306.041.062.748	97,37	1,03 (Efisien)
Total				100,72	314.722.233.000	306.270.176.094	97,31	Efisiensi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Sistem Informasi Statistik menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari perbandingan antara capaian kinerja terhadap persentase realisasi anggaran yang sebagian besar berada pada nilai ≥ 1 , yang berarti efisien.

■ Sasaran 1: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik

Capaian kinerja indikator Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) Direktorat Sistem Informasi Statistik mencapai 102,10 persen, melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, pada sasaran ini tidak terdapat alokasi anggaran (pagu dan realisasi anggaran sebesar Rp0), sehingga tingkat efisiensi anggaran tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Meskipun demikian, capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan statistik sektoral dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggaran langsung. Anggaran Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) Direktorat Sistem Informasi Statistik berada dalam RO Direktorat Diseminasi Statistik dan tidak dipergunakan dikarenakan kegiatan PSS dilaksanakan secara luring dan menggunakan kendaraan dinas.

■ Sasaran 2: Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional

Indikator Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) mencapai 100 persen dari target, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 53,76 persen dari pagu yang tersedia. Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi pada sasaran ini sebesar 1,86, yang menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan adanya pengelolaan anggaran yang efisien serta optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan SISNAS.

■ **Sasaran 3: Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima**

Indikator Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mencapai 100,05 persen, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97,37 persen. Nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 1,03, yang berarti bahwa sasaran ini telah dicapai secara efisien, di mana peningkatan kualitas layanan TIK dapat direalisasikan sejalan dengan penggunaan anggaran yang hampir sesuai dengan perencanaan.

■ **Efisiensi Anggaran Secara Keseluruhan**

Secara total, realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 97,31 persen dari total pagu anggaran, dengan capaian kinerja secara agregat diasumsikan sebesar 100 persen. Dengan demikian, nilai efisiensi anggaran secara keseluruhan adalah sebesar 1,03, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Sistem Informasi Statistik pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien.





PENUTUP



Penutup

4.1. Kesimpulan

Secara umum, capaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan komitmen Direktorat SIS dalam mencapai sasaran strategis. Sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target jangka menengah, yang menandakan bahwa strategi dan program yang dijalankan berada pada jalur yang tepat. Capaian **Indikator Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik** terhadap target 2025 sebesar **102,10 persen**, Capaian **Indikator Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)** terhadap target 2025 sebesar 100 persen, dan Capaian **Indikator Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi** terhadap target 2025 sebesar **100,05 persen**.

Capaian ini selaras dengan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, Direktorat SIS pada tahun 2025 berhasil meraih nilai kinerja organisasi sebesar **90,64** persen dengan predikat **"Baik"**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Direktorat SIS mampu merealisasikan sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta mencerminkan implementasi manajemen kinerja yang berjalan secara optimal dan memenuhi harapan yang ditetapkan. Mengacu pada ketentuan **Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024**, predikat **"Baik"** menandakan bahwa kinerja organisasi telah melampaui standar minimum yang dipersyaratkan, meskipun masih tersedia peluang peningkatan untuk mencapai kategori kinerja yang lebih tinggi, yaitu "Istimewa". Nilai ini juga menggambarkan bahwa kebijakan, program, dan aktivitas operasional Direktorat SIS telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan capaian output yang signifikan dan terukur.

Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan transformasi digital dalam proses bisnis, pemanfaatan sistem informasi kinerja, serta integrasi data yang semakin baik. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat akurasi dan ketepatan waktu pelaporan kinerja. Selain itu, koordinasi dan sinergi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja. Kolaborasi yang efektif memungkinkan penyelesaian hambatan lintas fungsi serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan saling mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur turut berkontribusi terhadap capaian kinerja. SDM yang adaptif terhadap perubahan dan teknologi baru menjadi modal utama dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi. Meskipun demikian, evaluasi kinerja juga mengidentifikasi adanya ruang perbaikan, terutama dalam menjaga konsistensi capaian antarindikator dan memastikan kesinambungan antara target jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengendalian dan monitoring kinerja secara berkelanjutan.

Dalam konteks efisiensi anggaran dan dinamika kebijakan, organisasi dituntut untuk semakin selektif dalam menetapkan prioritas kegiatan. Perencanaan yang berbasis risiko dan kebutuhan strategis menjadi penting agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Akuntabilitas kinerja juga perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas data kinerja dan dokumentasi pendukung. Data yang valid dan terdokumentasi dengan baik akan meningkatkan kredibilitas laporan

kinerja serta mendukung proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat SIS menunjukkan bahwa unit kerja telah berada pada tingkat kematangan kinerja yang baik. Tantangan ke depan adalah menjaga momentum perbaikan berkelanjutan agar capaian kinerja tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Dengan memperhatikan hasil evaluasi dan pembelajaran yang diperoleh, organisasi memiliki fondasi yang kuat untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pada periode selanjutnya.

4.2. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Kinerja Direktorat SIS pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100,72 persen**. Nilai tersebut mencerminkan bahwa secara umum seluruh indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui target yang direncanakan. Capaian ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang konsisten, serta dukungan koordinasi yang efektif antar unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga menunjukkan bahwa Direktorat SIS telah mampu mengelola sumber daya secara optimal dan menjalankan berbagai program kerja sesuai dengan arah kebijakan dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, komitmen seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola teknologi informasi, serta mendukung kegiatan operasional organisasi menjadi faktor penting dalam mendorong tercapainya kinerja yang optimal. Hal ini sekaligus menjadi indikator bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja telah berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, Direktorat SIS tetap memiliki ruang untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun 2026, baik dari sisi efektivitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas output, maupun penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Upaya perbaikan berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi tantangan yang semakin kompleks serta mendukung kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Dengan mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan mendorong peningkatan di berbagai aspek strategis, diharapkan Direktorat SIS dapat terus memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Secara garis besar pada area strategis Direktorat SIS perlu untuk memperkuat dan memperbaiki beberapa aspek, meliputi:

1. Penyelarasan antara perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan pelaksanaan program agar target jangka panjang dapat dicapai secara konsisten;
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan memanfaatkan dashboard kinerja dan analisis berbasis data;
3. Melakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
4. Menyusun prioritas kegiatan berbasis risiko dan dampak strategis untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan; dan
5. Memperbaiki kualitas data kinerja dan kelengkapan bukti dukung agar akuntabilitas kinerja semakin kredibel dan transparan.

Sedangkan untuk rencana tindak lanjut sepanjang tahun 2026 secara konsisten akan melaksanakan program kerja untuk meningkatkan kinerja Direktorat SIS meliputi:

1. Menjalinkan komunikasi dan kerja sama dengan K/L dengan menetapkan jadwal dan membuat rencana kerja pembinaan statistik sektoral K/L tahun 2026;
2. Meneruskan masukan dari Walidata terhadap aplikasi INDAH dan MS-SDS ke admin untuk perbaikan aplikasi;
3. Memantau progres penyiapan bukti dukung kegiatan EPSS K/L;
4. Memperluas cakupan layanan dengan melakukan rilis HaloBPS;

5. Mempercepat proses legalisasi Maklumat Layanan HaloBPS;
6. Melaksanakan MoU antara unit kerja yang melakukan kerjasama dengan Direktorat SIS khususnya dalam penggunaan HaloBPS;
7. Melakukan pelatihan PIC tim teknis layanan HaloBPS;
8. Melakukan sosialisasi HaloBPS untuk pengguna di BPS Pusat untuk meningkatkan awareness;
9. Melakukan pemantauan kinerja tim teknis layanan HaloBPS;
10. Melakukan diskusi kebijakan dengan pimpinan untuk mendukung pencapaian target triwulanan dan tahunan; dan
11. Melakukan pengembangan FASIH dan IPAS yang mendukung terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional, seperti: pengembangan iOS untuk pencacah, pengembangan FASIH PAPI & Web Entry, optimasi dashboard FASIH untuk mendukung SE2026, mengembangkan fitur *tracking* untuk mendukung SE2026, penyelesaian *frontend* FASIH SM, pengembangan fitur untuk menghasilkan perubahan data (delta) pada FASIH Form, pengembangan AI-agent IPAS untuk Insight Generator, implementasi IPAS-CM untuk dokumentasi fungsi dan formula yang ada di IPAS-PA, melakukan pengembangan *anomaly detection* menggunakan *unsupervised learning*, melakukan penyesuaian *resource* sesuai dengan *load* proses di Spark, dan pengembangan modul layanan lainnya.



LAMPIRAN



Lampiran

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025 Reviu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Parmiyanto, MEDC
Jabatan : Direktur Sistem Informasi Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Moh. Ari Nugraha, M.Sc
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Moh. Ari Nugraha, M.Sc
NIP. 19601104198302 1 001

Jakarta, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama


Joko Parmiyanto, MEDC
NIP. 19790909200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional	Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	80,00 Persen
3.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik	59,26 Poin

Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	2901 Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Rp.	266.850.800.000
Jumlah		Rp.	266.850.800.000

Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik


Moh. Ari Nugraha, M.Sc
NIP. 19601104198302 1 001

Jakarta, 23 Oktober 2025
Direktur Sistem Informasi Statistik


Loko Parniyanto, MEDC
NIP. 19790909200012 1 003

Lampiran 2. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025 Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Parmiyanto, MEDC
Jabatan : Direktur Sistem Informasi Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Plt. Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

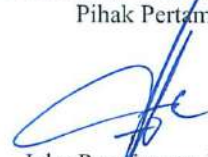
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama


Joko Parmiyanto, MEDC
NIP. 19790909200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK


No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional	Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	80,00 Persen
3.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik	59,26 Poin

Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	2901 Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Rp.	7.286.566.000
Jumlah		Rp.	7.286.566.000

Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik


Dr. Pudji Ismertini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

Palembang, 24 Januari 2025
Direktur Sistem Informasi Statistik


Joko Pamriyanto, MEDC
NIP. 19790909200012 1 003

Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai Aktif	Jumlah Pegawai Tugas Belajar	Jumlah Pegawai Cuti Luar Tanggungan Negara	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SMA/ sederajat	8	0	0	8
DIII	2	0	0	2
DIV/S1	106	4	0	110
S2	60	6	3	69
S3	3	0	0	3
Total	179	10	3	192

Lampiran 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

Nama Golongan	Pangkat	Jumlah Pegawai Aktif	Jumlah Pegawai Tugas Belajar	Jumlah Pegawai Cuti Luar Tanggungan Negara	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VII	Golongan VII	1	0	0	1
II/d	Pengatur Tk.1	1	0	0	1
III/a	Penata Muda	39	0	0	39
III/b	Penata Muda Tk.1	32	2	1	35
III/c	Penata	44	2	0	46
III/d	Penata Tk.1	48	1	2	51
IV/a	Pembina	4	5	0	9
IV/b	Pembina Tk.1	7	0	0	7
IV/c	Pembina Utama Muda	3	0	0	3
Total		179	10	3	192

Lampiran 5. Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025

Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai Aktif	Jumlah Pegawai Tugas Belajar	Jumlah Pegawai Cuti Luar Tanggungan Negara	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pranata Komputer Mahir	3	0	0	3
Pranata Komputer Ahli Madya	12	0	0	12
Pranata Komputer Ahli Pertama	67	1	1	69
Arsiparis Terampil	1	0	0	1
Pranata Komputer Terampil	1	0	0	1
Pranata Komputer Penyelia	4	0	0	4
Pranata Komputer Ahli Muda	87	0	1	87
Total	175	1	2	178

Lampiran 6. Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Tahun 2025

- a. Kementerian Pertahanan
- b. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
- c. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- d. Badan Inteligen Negara
- e. Badan Pengawas Pemilihan Umum
- f. Ombudsman Republik Indonesia

Lampiran 7. Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Tahun 2025



HASIL VERIFIKASI KEMATANGAN KEAMANAN SIBER

Tingkat Kematangan Keamanan Siber Kategori SE: Strategis	2025				Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Siber
	Tingkat Kematangan	Nilai Kematangan	Nilai Peningkatan per Siklus	Ruang Tingkat Kematangan per Siklus	
Total	3,91	3,99			Level 4 - Terkelola
Kelembagaan	0,00	0,00			
Manajemen	0,00	0,00			
Kelembagaan	0,00	0,00			
Manajemen	0,00	0,00			
Kelembagaan	0,00	0,00			
Manajemen	0,00	0,00			
Kelembagaan	0,00	0,00			
Manajemen	0,00	0,00			
Kelembagaan	0,00	0,00			
Manajemen	0,00	0,00			
Kelembagaan	0,00	0,00			
Manajemen	0,00	0,00			
Kelembagaan	0,00	0,00			
Manajemen	0,00	0,00			





Lampiran 8. Daftar Inovasi Direktorat SIS Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Aspek Inovasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Integrasi pengelolaa risiko dan pengukuran kinerja triwulanan	Tata Kelola dan Manajemen Kinerja Berbasis Risiko	Pengukuran kinerja Direktorat SIS yang berbasis manajemen risiko. Inovasi ini memungkinkan identifikasi risiko strategis dan operasional dilakukan secara simultan dengan evaluasi capaian kinerja, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih komprehensif, objektif, dan berorientasi pencegahan. Melalui pendekatan ini, Direktorat SIS mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan pencapaian target strategis yang lebih adaptif terhadap risiko.

No	Nama Inovasi	Aspek Inovasi	Keterangan
2	SIS Traffic Light	Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Dashboard monitoring program kerja dan kegiatan untuk setiap tim kerja di SIS. Dashboard ini menyajikan status dan progres kegiatan hingga periode mingguan secara visual (<i>traffic light</i>), sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan pemantauan kinerja secara cepat dan terukur. Inovasi ini berfungsi sebagai alat bantu pengendalian pelaksanaan program serta bahan diskusi berbasis data dalam rapat rutin, yang pada akhirnya meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efektivitas pengambilan keputusan di lingkungan Direktorat SIS.
3	Dashboard Monitoring Pengadaan Infrastruktur TI	Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Dashboard monitoring untuk setiap pengadaan infrastruktur TI di Direktorat SIS mencakup kemajuan dan status dari <i>clearance</i> , kemajuan penyerapan anggaran, isu pengadaan, risiko setiap tahapan, tindakan mitigasi yang dilakukan, dan tindak lanjutnya. Pemantauan <i>end-to-end</i> atas setiap proses pengadaan infrastruktur TI. Dashboard ini menampilkan status <i>clearance</i> , progres pelaksanaan, tingkat penyerapan anggaran, isu pengadaan, risiko pada setiap tahapan, serta tindakan mitigasi dan tindak lanjut yang dilakukan. Inovasi ini dimanfaatkan pimpinan sebagai alat monitoring mingguan untuk memastikan pengadaan TI berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan infrastruktur TI di lingkungan SIS.
4	Dashboard pengelolaan risiko TI	Sistem Monitoring	Dashboard pengelolaan risiko TI yang mengelola dan menyediakan registrasi serta pemantauan risiko TI secara terintegrasi dari seluruh aktivitas dan tim kerja di lingkungan DSIS. Dashboard ini mengonsolidasikan identifikasi, analisis, dan tindak lanjut risiko ke dalam satu sistem terpadu melalui pengelolaan terintegrasi, inovasi ini menghasilkan <i>risk register</i> TI yang lengkap, konsisten, dan komprehensif, sehingga mendukung pengendalian risiko yang lebih efektif, peningkatan akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis risiko dalam pengelolaan kegiatan TI di Direktorat SIS.

No	Nama Inovasi	Aspek Inovasi	Keterangan
5	SINERGI	Proses Bisnis Aplikasi	Inovasi berupa Sistem informasi yang dibangun melalui penggabungan SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi) dan AKIP, dengan integrasi data SIMONEV ke KIPAPP serta konektivitas dengan aplikasi back-office untuk pengambilan data realisasi anggaran. Integrasi ini menghadirkan pengelolaan data kinerja dan anggaran yang terpusat dan saling terhubung. Inovasi ini mempercepat proses kerja tim, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data, sehingga mendukung penguatan tata kelola kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat SIS.
6	KipApp	Pengembangan Fitur	Pengembangan fitur pencatatan aktivitas harian pada aplikasi presensi yang terintegrasi langsung dengan KipApp. Inovasi ini memungkinkan aktivitas pegawai terdokumentasi secara rutin dan otomatis. Melalui integrasi ini, pegawai lebih mudah dan efisien dalam pengisian KipApp di akhir bulan, sekaligus meningkatkan akurasi pelaporan kinerja, ketertiban administrasi, dan konsistensi data aktivitas kerja di lingkungan Direktorat SIS.
7	Web Counselling Center BPS	Layanan Digital	Inovasi layanan digital (https://counseling.web.bps.go.id/) yang dikembangkan oleh Direktorat SIS dan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyediakan akses konseling yang mudah, aman, dan rahasia bagi pegawai. Melalui platform berbasis web, pegawai dapat memperoleh dukungan psikologis secara lebih cepat dan terstruktur, tanpa batasan ruang dan waktu. Inovasi ini meningkatkan kesejahteraan mental pegawai, mendukung produktivitas dan kinerja organisasi, serta mencerminkan komitmen BPS dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada manusia di era transformasi digital.
8	Dashboard dan tata kelola lembur	Dashboard	Pengelolaan lembur secara terintegrasi dan transparan. Melalui dashboard ini, pimpinan dan pengelola lembur dapat memantau realisasi lembur secara real-time, memastikan kesesuaian beban kerja, meningkatkan efisiensi administrasi, ketertiban tata kelola SDM, dan keadilan pengelolaan lembur, sekaligus mendukung budaya kerja profesional dan transformasi digital di lingkungan Direktorat SIS.

No	Nama Inovasi	Aspek Inovasi	Keterangan
9	Summarization Ticket FASIH	Metode	Merupakan yang memanfaatkan <i>Natural Language Processing</i> (NLP) untuk mengelola laporan atau tiket pengguna dari petugas aplikasi FASIH secara otomatis. Inovasi ini dikembangkan untuk membantu pengembang dan pimpinan memahami permasalahan serta kebutuhan pengguna secara cepat dan akurat di tengah meningkatnya penggunaan aplikasi mobile. Melalui penerapan metode iterative prompt menggunakan ChatGPT, sistem mampu melakukan klasifikasi dan peringkasan tiket secara lebih akurat, koheren, dan informatif dibandingkan pendekatan prompt sederhana. Inovasi ini meningkatkan efisiensi penanganan gangguan, kualitas analisis laporan pengguna, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data dalam pengelolaan layanan digital di lingkungan Direktorat SIS.
10	Analisis Data Feedback Pariwisata	Analisis Data	Merupakan inovasi yang memanfaatkan <i>Natural Language Processing</i> (NLP) untuk mengolah umpan balik responden survei wisatawan berbentuk teks terbuka agar dapat dianalisis secara terstruktur dan sistematis. Inovasi ini menggabungkan pemodelan topik klasik dan pendekatan berbasis representasi semantik modern yang disesuaikan dengan model bahasa Indonesia, serta menerapkan analisis sentimen berbasis agregasi multi-model untuk menghasilkan wawasan tematik dan sentimen yang lebih akurat. Inovasi ini mendukung pengambilan kebijakan pariwisata yang lebih tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat bagi Direktorat SIS dalam meningkatkan kualitas dan pengembangan aplikasi berbasis umpan balik pengguna, serta bagi Direktorat Statistik Pariwisata dalam penyempurnaan kuesioner survei, penguatan indikator statistik, dan analisis pariwisata yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna data.
11	Platform DevsecOps	Aplikasi	Dirancang untuk mendukung pengembangan sistem aplikasi yang aman dan andal melalui integrasi praktik <i>development</i> , <i>security</i> , dan <i>operations</i> dalam satu alur kerja terpadu. Platform ini mengotomatisasi pengujian keamanan, pengendalian kualitas, dan proses rilis aplikasi sejak tahap awal pengembangan. Inovasi ini meningkatkan keamanan aplikasi, keandalan sistem, dan efisiensi siklus pengembangan, serta memperkuat tata kelola pengembangan aplikasi TI di lingkungan Direktorat SIS.

No	Nama Inovasi	Aspek Inovasi	Keterangan
12	Virtualisasi Server	Aplikasi	Inovasi yang diterapkan untuk mendukung layanan hosting sistem aplikasi secara terpusat dan efisien. Melalui pemanfaatan teknologi virtualisasi, pengelolaan sumber daya komputasi menjadi lebih fleksibel, terukur, dan optimal. Inovasi ini meningkatkan keandalan layanan aplikasi, efisiensi pemanfaatan infrastruktur TI, serta kemudahan pengelolaan dan skalabilitas sistem, sehingga mendukung keberlangsungan layanan digital di lingkungan BPS.
13	Sistem Monitoring Fasilitas Pendukung Pusat Data	Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan perangkat dan fasilitas pendukung Pusat Data secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan monitoring kondisi operasional fasilitas secara real-time. Inovasi ini meningkatkan keandalan operasional Pusat Data, mempercepat deteksi potensi gangguan, serta mendukung pengelolaan infrastruktur TI yang lebih proaktif dan akuntabel di lingkungan Direktorat SIS khususnya, dan BPS pada umumnya.
14	Sistem Monitoring Infrastruktur TI	Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan layanan dan kinerja perangkat infrastruktur TI secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan monitoring kondisi infrastruktur secara real-time sebagai dasar pengendalian operasional. Inovasi ini meningkatkan keandalan layanan TI, mempercepat deteksi dan penanganan gangguan, serta mendukung pengelolaan infrastruktur yang lebih proaktif dan akuntabel di lingkungan Direktorat SIS
15	Sistem Monitoring Keamanan Informasi:	Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Inovasi yang dikembangkan untuk memantau keamanan akses dan lalu lintas data/informasi yang masuk dan keluar dari Pusat Data. Sistem ini memungkinkan pengawasan aktivitas jaringan dan potensi ancaman keamanan secara terpusat dan berkelanjutan. Inovasi ini meningkatkan perlindungan data dan sistem, memperkuat deteksi dini insiden keamanan, serta mendukung pengelolaan keamanan informasi yang lebih proaktif dan akuntabel di lingkungan Direktorat SIS khususnya dan BPS pada umumnya
16	Sistem Monitoring Aset Perangkat Infrastruktur TI:	Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan dan pengendalian konfigurasi aset perangkat infrastruktur TI Pusat Data secara terintegrasi. Sistem ini menyediakan informasi aset dan konfigurasi perangkat yang terdokumentasi dan terpantau secara berkelanjutan. Inovasi ini meningkatkan akurasi data aset, ketertiban pengelolaan konfigurasi, serta efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan infrastruktur TI di lingkungan Direktorat SIS dan BPS

No	Nama Inovasi	Aspek Inovasi	Keterangan
17	Sistem Monitoring Koneksi Jaringan	Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan lalu lintas koneksi jaringan dan kinerja perangkat jaringan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan pengawasan kondisi jaringan secara <i>real-time</i> sebagai dasar pengendalian operasional. Inovasi ini meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan jaringan, mempercepat deteksi gangguan, serta mendukung pengelolaan jaringan yang lebih proaktif dan akuntabel di lingkungan Direktorat SIS dan BPS

Lampiran 9. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Unit Kerja TA 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)
Sasaran 1. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik							
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik	Poin	59,26	60,50	102,10	0	0	0
Sasaran 2. Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional							
Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)	Persen	100	100	100	426.213.000	229.113.346	53,76
Sasaran 3. Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima							
Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	80	80,04	100,05	314.296.020.000	306.041.062.748	97,37
Total					314.722.233.000	306.270.176.094	97,31

Capaian kinerja Unit Kerja Direktorat Sistem Informasi Statistik pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.





BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046 Mailbox : bpshq@bps.go.id
Website: <https://www.bps.go.id>

